

**PENGARUH KETERLIBATAN WAKIL BUPATI PEREMPUAN DALAM
MEWUJUDKAN TATA KELOLA ANGGARAN BERBASIS GENDER
STUDI KASUS DI KABUPATEN SIMEULUE**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**RIA MILA ROSADI
NIM. 170801003**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Mila Rosadi
NIM : 170801003
Program Studi : Ilmu Politik
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

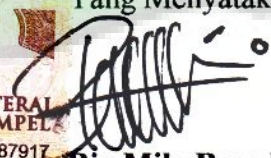
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Ria Mila Rosadi
NIM. 170801003

**“PENGARUH KETERLIBATAN WAKIL BUPATI PEREMPUAN DALAM
MEWUJUDKAN TATA KELOLA ANGGARAN BERBASIS GENDER
STUDI KASUS DI KABUPATEN SIMEULUE”**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

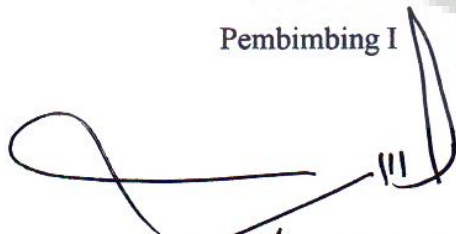
RIA MILA ROSADI

NIM. 170801003

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk di uji/di munaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A.
NIP. 197309212000032004

Pembimbing II



Rizkika Lhena Darwin, M.A.
NIP. 198812072018032001

SKRIPSI

**Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Pemerintahan Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Beban Program Studi Sarjana (S-1) Ilmu Politik.**

Diajukan Oleh:

**RIA MILA ROSADI
NIM. 170801003**

**Pada Hari/Tanggal : Selasa, 3 Agustus 2021
24 Dzulhijah 1442**

Di

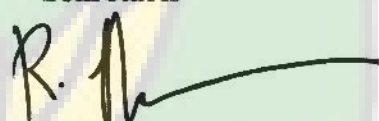
Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A.
NIP. 197309212000032004

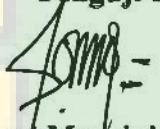
Sekretaris


Rizkika Lhena Darwin, M.A.
NIP. 198812072018032001

Penguji I


Dr. Rasyidah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309081998032002

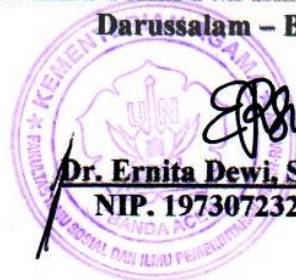
Penguji II


Ramzi Murziqin, M.A.
NIP. 198605132019031006

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh**


Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002



ABSTRAK

Nama : Ria Mila Rosadi
NIM : 170801003
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/ Ilmu Politik
Judul : Pengaruh Keterlibatan Wakil Bupati Perempuan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Anggaran Berbasis Gender Studi Kasus Di Kabupaten Simeulue
Pembimbing I : Dr. Ade Irma,
Pembimbing II : Rizkika Lhena Darwin, MA

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh keterlibatan wakil bupati dalam mewujudkan tata kelola anggaran berbasis gender di Kabupaten Simeulue dan melihat tantangan wakil bupati perempuan dalam mendorong kebijakan anggaran responsif gender. Metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh wakil bupati perempuan dalam mewujudkan anggaran berbasis gender di Kabupaten Simeulue tidak berdampak terhadap proporsi penganggaran berbasis gender karena secara regulasi di level Kabupaten Simeulue tidak ada regulasi baru. Sejauh ini regulasi yang digunakan merujuk kepada regulasi nasional dan qanun Aceh tidak ada regulasi Kabupaten Simeulue yang spesifik gender, komposisi atau penempatan penganggaran di Kabupaten Simeulue berbasis gender yaitu dinas P3AKB, BPMD (PKK, DEKRANAS dan Majelistaklim), Proporsi SKPD tidak ada sama sekali orang-orang dari Ibu Afridawati yang secara keseluruhan adalah orang-orang dari bapak bupati. Tantangan wakil bupati perempuan dalam mendorong kebijakan anggaran responsif gender disebabkan karena faktor internal dan eksternal. Kedepan pemimpin perempuan yang memiliki kapasitas diri dan wajib punya SDM sehingga tahu tupoksinya sebagai pemimpin perempuan, harus membangun beginning dengan pasangan (bupati), dan harus membangun beginning dan negosiasi dengan partai pengusung.

Kata Kunci: *ARG, Wakil Bupati Perempuan, Simeulue.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul *“Pengaruh Keterlibatan Wakil Bupati Perempuan dalam Mewujudkan Tata Kelola Anggaran Berbasis Gender Studi Kasus Di Kabupaten Simeulue”*. Saya menyadari bahwa terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan proposal penelitian dan memerlukan banyak perbaikan. Untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan proposal skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis dengan tulus ikhlas saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu/bapak

1. Terima Kasih kepada Allah SWT dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Orang Tua Tercinta dan Keluarga Besar yang telah mendoakan, Menyemangati, baik dari segi materil maupun non materil.
3. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Uin Ar-Raniry.
4. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
5. Dr. H. Abdullah Sani, Lc, M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Politik. Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik. Muji Mulia. M.A Selaku Penasehat Akademik beserta jajarannya.

6. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Ade Irma Selaku pembimbing I dan Rizkika Lhena Darwin M.A selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam Memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada saudara terkasih Ova, Risky, Bella, Dinda, Cut, Ramadhan, dan Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik Angkatan 2017 dan dengan Motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan Kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun Secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 20 Januari 2021
Penulis,

Ria Mila Rosadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penulisan	11
1.4 Manfaat Penulisan	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 13
2.1 Pembahasan Penelitian Yang Relevan	13
2.2 Landasan Teori.....	22
2.2.1 Anggaran Responsif Gender	22
 BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	 33
3.1 Metode Penelitian.....	33
3.2 Fokus Penelitian	34
3.3 Lokasi Penelitian	34
3.4 Metode Pengumpulan Data	34
3.5 Sumber Data.....	37
3.6 Informan Penelitian	38
3.7 Metode Analisis Data	38
3.8 Validasi Data	40
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 44
4.1 Profil Simeulue Dan Wakil Bupati Perempuan	44
4.1.1 Profil Simeulue.....	44
4.1.2 Profil Wakil Bupati Simeulue	49
4.2 Wakil Bupati Perempuan Dan Anggaran Berbasis Gender Di Kabupaten Simeulue	56
4.3 Tantangan Wakil Bupati Perempuan Dalam Mendorong Kebijakan Anggaran Responsif Gender.....	67
4.2.1 Internal	67
4.2.2 Eksternal	69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak	12
Tabel 3.1	Informan Penelitian	43
Tabel 4.1	Pertumbuhan Ekonomi.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2 : Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gender adalah persepsi masyarakat atau yang mengacu pada peran, perilaku, ekspresi, dan identitas seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Gender menjadi aspek dominan dalam hubungan kekuasaan, relasi kelas, golongan usia maupun etnisitas, dan gender juga terlibat didalamnya. Hubungan gender dengan politik dapat ditemukan mulai dari lingkungan keluarga antara suami dan istri sampai pada tataran kemasyarakatan yang lebih luas. Diera kontemporer saat ini peran perempuan berada dalam arena sosial dan politik, dikarenakan tampilnya perempuan di panggung politik sedikit meningkat.

Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran antara laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan.¹ Hadirnya Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan dan memberikan dampak yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Alokasi ARG adalah belanja pemerintah yang merespon kebutuhan gender sehingga memiliki dampak bagi kesetaraan dan keadilan gender.

¹ Arkaniyati. 2012. *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Usahatani Bawang Merah Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah*. (diAkses pada 21 Januari 2021).

Anggaran yang responsif gender sendiri merupakan bagian dari Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dikarenakan ARG bukanlah anggaran yang terpisah bagi laki-laki dan perempuan, melainkan strategi untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam proses penganggaran dan menerjemahkan komitmen para pihak untuk mewujudkan kesetaraan gender ke dalam komitmen anggaran.²

Mengenai gambaran dari konsep ARG sendiri, pertama anggaran untuk perempuan secara otomatis akan responsif gender, kedua anggaran responsif gender merupakan pengganti terhadap sistem anggaran berbasis kerja, ketiga apabila anggaran ini sudah berpihak pada orang miskin, maka sudah dipastikan anggaran ini juga akan responsif gender, keempat manfaat penerapan anggaran responsif gender jauh lebih sedikit dari pada upaya dan biaya yang harus dikeluarkan, kelima sebuah anggaran dikatakan responsif gender bilamana indikatornya secara eksplisit mencantumkan indikator gender, dan terakhir tidak semua anggaran harus dibuat responsif gender.³

² Budlender, Debbie dan Rhonda Sharp. 1998. *Bagaimana Melakukan Analisis Anggaran Peka Gender: Penelitian dan Praktik Kontemporer*. Sydney: Sekretariat Persemakmuran / Badan Pembangunan Internasional Australia. ('Review of Gender Responsive Budget Initiatives).

³ Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender . 2010. *Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender*. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Perdagangan.

Negara Indonesia pada peraturan (Inpres Nomor 9 Tahun 2000) pemerintah telah menyatakan keberpihakannya untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dengan mengeluarkan kebijakan pengarusutamaan gender pada semua program kerjanya. Sehingga pentingnya politik anggaran berbasis pengarusutamaan gender demi kesetaraan antara laki-laki/perempuan dalam segi pembangunan maupun politik.

Pada tahun 2011, ARG telah menjadi komitmen pemerintah dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 104 Tahun 2010 mulai diuji cobakan pada 7 (tujuh) Kementerian atau Lembaga Negara yaitu Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁴

Di daerah, pelaksanaan ARG sebenarnya sudah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah, namun penegasan untuk melaksanakan ARG melalui analisis gender baru tercantum dalam Permendagri Nomor. 67 Tahun 2011.

⁴ Ibid.

Sejak tahun 2014, Pemerintah Provinsi Aceh sudah mulai melaksanakan PUG melalui penerapan dan pelaksanaan anggaran responsif gender yang berdasarkan pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang penerapan dan pelaksanaan anggaran responsif gender pada satuan kerja perangkat Aceh, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2019 tentang percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Pemerintah Aceh.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), apabila nilai IPG semakin mendekati angka 100 atau sama dengan angka 100 maka menunjukkan kesetaraan gender yang dicapai semakin membaik. Jika nilai IPG dan IDG berada di bawah dari angka 100 maka menunjukkan pencapaian perempuan lebih rendah dari laki-laki dan apabila melebihi angka 100 maka menunjukkan bahwa pencapaian laki-laki lebih rendah dari perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang dapat dilihat dari komponen yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita.⁵

⁵ www.bps.go.id (diakses pada 20 Februari 2021).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan gender (IPG) Indonesia pada tahun 2017 sebesar (90,96), tahun 2018 sebesar (90,99) dan tahun 2019 sebesar (91,07). Data ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan gender yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG ini dijadikan dasar untuk membandingkan pencapaian kesetaraan gender pada provinsi-provinsi di Indonesia apakah ketimpangan gender nya semakin rendah atau semakin tinggi.

Provinsi Aceh sendiri merupakan salah satu dari 34 provinsi di Indonesia. Provinsi Aceh memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.288.885 jiwa dimana jumlah laki-laki sebanyak 2.652.616 jiwa dan perempuan 2.636.269 jiwa. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh dengan IPG Nasional, apabila dilihat perbandingannya dengan 9 (sembilan) provinsi lainnya se Sumatera, maka Aceh berada pada posisi ke empat terbawah.

Alasan dilaksanakan pengarusutamaan gender karena mempunyai beberapa tujuan yaitu meningkatkan kesadaran pemahaman, komitmen para pengambilan keputusan tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan gender, pengintegrasian, aspirasi, serta kebutuhan laki-laki dan perempuan di berbagai sektor pembangunan dalam mewujudkan kualitas pembangunan daerah yang berkeadilan gender.

Sehingga keterwakilan perempuan di pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan peran kelembagaan pengarusutamaan gender untuk mempercepat pelaksanaan, perencanaan dan tata kelola penganggaran yang responsif gender. Sehingga perumusan kebijakan politik anggaran berbasis gender ada dalam program pembangunan daerah.⁶

Sehingga mengenai kebijakan atau praktek yang dilakukan pemerintah daerah dalam beberapa tahun belakang hingga sekarang masih menunjukkan tren yang tidak begitu beranjak maju dalam mewujudkan kepentingan penganggaran berkeadilan gender (gender budgeting) meski sudah terdapat regulasi dari pusat. Kemudian baiknya diterapkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan wakil bupati sebagai pemimpin daerah.⁷

Pada tahun 1945 gelar dari Bupati sebenarnya hanya dipakai di pulau Jawa, Madura, dan Bali. Semenjak kemerdekaan, istilah bupati dipakai untuk menggantikan “regent” di seluruh wilayah Indonesia. Adapun mengenai keberadaan wakil kepala daerah sendiri khususnya mendampingi kepala daerah menjalankan tugas-tugas pemerintahan di daerah, posisi ideal penting atau tidaknya keberadaan wakil kepala daerah saatnya menjadi perhatian, mengingat kinerja wakil kepala daerah di sejumlah daerah sangat variatif, bahkan tidak sedikit daerah di mana kepala daerah dan wakil kepala daerahnya berselisih.

⁶ <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/55371> (diakses pada 21 Januari 2021).

⁷ Ani Widyani Soetjipto. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta:Kompas Media Nusantara hlm. 22-23.

Undang-undang tentang pemerintahan daerah menyebutkan secara tegas sejumlah tugas wakil kepala daerah. Dalam pola kepemimpinan paket di era reformasi, tugas wakil kepala daerah sebagaimana digariskan dalam undang-undang adalah membantu kepala daerah, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dan melaksanakan tugas serta kewenangan kepala daerah apabila berhalangan.

Pembagian tugas secara terperinci dilakukan atas kesepakatan kedua pihak yang dirumuskan dan diputuskan dalam ketentuan tersendiri, garis tugas yang sangat umum dalam undang-undang dan pembagian kerja secara terperinci yang diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak bisa menimbulkan suasana tawar-menawar atau "*bargaining position*" antara kedua belah pihak. Hasilnya bisa saja memuaskan atau tidak memuaskan salah satu pihak, atau keduanya sama-sama tidak puas karena sebagian kewenangannya terambil oleh pihak lain.

Yang tak kalah pentingnya adalah persoalan kewenangan wakil Bupati yang semakin tidak jelas kewenangannya dalam bidang apa saja, mengingat pemegang otoritas kekuasaan biasanya terpusat pada Bupati, padahal kalau melihat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan bersama-sama antara keduanya akan tetapi memiliki kewenangan yang cukup signifikan diantara keduanya.

Wakil Bupati Kabupaten Simeulue, tidak pernah diberi wewenang oleh Bupati, untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Hal itu menjadi contoh kecil dari kesekian wakil kepala daerah yang merasa belum puas dengan adanya kewenangan yang dimilikinya yang kadang berada kuat di tangan Kepala Daerah.

Di Kabupaten Simeulue kewenangan Wakil Bupati menjadi tidak jelas dengan adanya terpusatnya kekuasaan yang berada pada Bupati sebagai Kepala Daerah, sehingga tugas dan fungsi wakil Bupati menjadi kurang jelas peran sertanya selama ini. Untuk itu seringkali kewenangan dan pekerjaan Wakil Bupati hanya sebagai ban serap kalau dimungkinkan ditunjuk oleh Bupati dalam kewenangannya sebagai kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahan dalam kesehariannya. Namun melihat wakil bupati telah di akhir masa pemerintahannya, semetinya dapat mendorong anggaran berbasis gender di Kabupaten Simeulue dengan melihat pengaruh keterlibatannya dalam setiap perumusan anggaran dengan pendapat dan suaranya sebagai wakil bupati di dengar dan mampu bekerja sama dengan baik.

Maka banyak kasus seperti wakil pemerintah daerah yang sesudah menjabat sebagai wakil pemerintah daerah yang mundur atau mengundurkan dirinya dari jabatan yang di pegang entah itu menjadi wakil dari bupati atau pun menjadi gubernur dari wakil gubernur yang mengundurkan dirinya sebelum masa priodenya berakhir.

Oleh karena itu, untuk melihat pengaruh keterlibatan wakil kepala daerah perempuan dalam setiap aspek pemerintahan daerah mampu terlibat aktif dalam membantu, memberi pendapat dan selaras dengan bupati untuk bekerja sama membangun daerah untuk arah lebih baik lagi, salah satunya pengentasan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat dan daerah yang ramah gender.

Dalam hal ini kepala daerah perempuan semestinya dapat mendorong terwujudnya kebijakan anggaran berbasis gender, dikarenakan memiliki peluang dan kesempatan berperan dalam pengambilan keputusan terlebih lagi itu akan berdampak bagi kehidupannya. Partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan upaya tata kelola merupakan salah satu langkah nyata untuk mencapai kondisi yang adil bagi perempuan. Sudah seharusnya kepala daerah perempuan memanfaatkan perannya untuk memperjuangkan keadilan gender, yang mana selama ini masih tingginya ketimpangan gender karena perempuan tidak memiliki peran penting untuk mendorong terwujudnya kebijakan anggaran berbasis gender di daerah.

Melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur maupun bupati/walikota dan wakil bupati/walikota, secara langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin daerah. Pilkada pada tahun 2017 ini digelar secara serentak diseluruh Indonesia. Aturan umum yang dipakai ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota.

Pada Pilkada Aceh tahun 2017, terdapat 178 orang calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, hanya 14 orang perempuan baik sebagai calon bupati/wali kota maupun sebagai wakil, dan dari 14 calon perempuan tersebut hanya 1 orang terpilih sebagai wakil bupati.⁸

⁸ www.kpu.go.id (di akses pada 20 Februari 2021).

Pengaruh keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan sangat diperlukan dalam pembangunan guna mewujudkan kehidupan negara yang menjamin setiap warga negaranya aktif dalam pembangunan. Keterlibatan perempuan dalam dunia politik dapat juga menentukan kepemimpinan politik lokal. Pada Pilkada 2017 pemimpin daerah perempuan di Aceh yang terpilih adalah Wakil Bupati Simeulue.

Kabupaten Simeulue sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat, terbentuknya Kabupaten Simeulue merupakan buah dari undang-undang nomor 48 tahun 1999 yang diparipurnakan oleh DPRD Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada 27 September 1996 dan peresmian Kabupaten Simeulue pada tanggal 12 Oktober 1999. Dengan itu secara sah pulau tersebut menjadi Kabupaten Simeulue secara mandiri dapat mengatur rumah tangganya dari dulu hingga sekarang.

Sekarang Kabupaten Simeulue dipimpin oleh bapak Erli Hasyim dan ibu Afridawati. Sebenarnya wakil bupati Simeulue sekarang adalah seorang perempuan yang mana sejak daerah ini dimekarkan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2017 pertama kali dalam sejarah perempuan dipercaya untuk ikut memimpin daerah tercinta, kehadiran wakil bupati perempuan di pemerintah daerah menjadi jawaban karena suatu kepercayaan besar dari masyarakat Simeulue sehingga terpilih menjadi wakil bupati perempuan terpilih pada tahun 2017-2021.⁹

⁹ www.simeuluekb.go.id (diakses pada 21 januari 2021).

Berdasarkan visi misi dan program prioritas Kabupaten Simeulue terdapat dalam RPJMK Simeulue fokus pelayanan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan anak dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sehingga untuk mengukur keberhasilan kepala daerah perempuan mendorong kebijakan anggaran berbasis gender, salah satunya dengan melihat angka IPG. Data (IPG) Provinsi Aceh tahun 2017 sebesar (91,67), tahun 2018 sebesar (91,67) dan tahun 2019 sebesar (91,84). Menunjukkan terdapat kesenjangan antar kabupaten/kota, dan yang memperhatikan angka IPG terendah Aceh ada di daerah Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan data BPS, dilihat dari data IPG Kabupaten Simeulue pada tahun 2017 sebesar (76,72), tahun 2018 sebesar (77,52) dan tahun 2019 sebesar (77,92). Meskipun setiap tahunnya tidak mengalami penurunan tapi angka IPG Kabupaten simuelue masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan angka IPG tertinggi di Aceh tengah, berkisar sebesar (97,69) setiap tahunnya.¹⁰

Rendahnya indeks pembangunan gender (IPG) di Kabupaten Simuelue, dikarenakan fenomena ketimpangan gender di Kabupaten Simeulue relatif tinggi, seperti angka kematian ibu dan anak cukup tinggi, partisipasi perempuan dalam musrembangdes dan forum publik masih rendah, putus sekolah dan tingkat kemiskinan terutama perempuan status (Janda), angka harapan hidup perempuan rendah, kasus kekerasan berbasis gender cukup tinggi.

¹⁰ www.bps.go.id (diakses pada 20 Februari 2021).

Berikut data rekapitulasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Simeulue:¹¹

NO	KABUPATEN SIMEULUE	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019 (Triwulan I)
1	Kasus perempuan	9	6	3
2	Kasus anak	13	5	1
3	Kasus kekerasan yang ditangani oleh lembaga layanan	22	11	4
	Total	44	22	8

Hipotesa :

Penulis menduga kasus-kasus yang kerap terjadi kepada perempuan dan anak di Kabupaten Simeulue dikarenakan belum optimalnya upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola anggaran berbasis gender, hal tersebut disebabkan oleh pemerintah daerah baik bupati dan wakil bupati yang tidak mengakses kebijakan politik anggaran berbasis gender yang baik, padahal pemerintah daerah simeulue melibatkan perempuan sebagai pemimpin harusnya bisa menjawab kegelisahan terhadap kasus-kasus tersebut di masyarakat.

¹¹ <https://dinaspppa.acehprov.go.id/> (diakses pada 23 Januari 2021)

Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), meliputi : KDRT, kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, pemerkosaan, seksual, trafficking, eksploitasi seksual, dan lain-lain. Sedangkan Kekerasan Terhadap Anak (KTA), meliputi : kekerasan fisik, kekerasan psikis, pelecehan seksual, sexual (Incess), sodomi, trafficking, penelantaran, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, KDRT, Pemerkosaan, ABH dan lain-lain.

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, sangat menarik untuk dikaji lebih dalam dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh keterlibatan wakil bupati perempuan dalam perumusan kebijakan dalam mewujudkan tata kelola anggaran berbasis gender dan sejauh manakah tata kelola anggaran pemerintah daerah yang berbasis gender di Kabupaten Simeulue. untuk itu, penulis tertarik membuat penelitian **“Pengaruh Keterlibatan Wakil Bupati Perempuan Dalam Mewujudkan Tata Kelola Anggaran Berbasis Gender Di Kabupaten Simeulue”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh keterlibatan wakil bupati perempuan dalam mewujudkan anggaran berbasis gender di Kabupaten Simeulue?
2. Bagaimana tantangan wakil bupati perempuan dalam mendorong kebijakan anggaran responsif gender?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh wakil bupati dalam mewujudkan anggaran berbasis gender di Kabupaten Simeulue.
2. Untuk mengetahui tantangan wakil bupati perempuan dalam mendorong kebijakan anggaran responsif gender.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat Teoritis

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu politik terkait dengan politik anggaran berbasis gender di Kabupaten Simeulue.
2. Bagi mahasiswa dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penganggaran berbasis gender di Kabupaten Simeulue.
2. Peneliti khususnya dapat mengetahui bagaimana pengaruh wakil bupati dalam mewujudkan anggaran berbasis gender di Kabupaten Simeulue dan bagaimana tantangan wakil bupati perempuan dalam mendorong kebijakan anggaran responsif gender. Agar dapat menjadi masukan untuk pemerintahan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini ada beberapa kutipan referensi terdahulu yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian, penelitian tentang ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh para penulis dan peneliti sebagai berikut:

Penelitian pertama ditulis oleh Soetji Lestari yang berjudul partisipasi politik perempuan dalam masyarakat Jawa Bagelen studi mengenai potret capaian indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo diakhir program MDGs. Dalam penelitian ini untuk mengkaji partisipasi politik perempuan dalam masyarakat Jawa Bagelen yang berada di wilayah Kabupaten Purworejo dan Kebumen.

Kajian didasarkan pada data sekunder yang bersumber dari Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2016 yang diterbitkan oleh BPS dan KPPPA, serta Kabupaten Purworejo dalam Angka dan Kabupaten Kebumen dalam Angka.¹²

¹² Soetji Lestari. 2018. *Partisipasi politik perempuan dalam masyarakat Jawa Bagelen studi mengenai potret capaian indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo diakhir program MDGs*. Universitas Jendral Sudirman Purwokerto. LPPM.

Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa walaupun Purworejo dan Kebumen berada dalam kultur yang relatif sama yaitu Jawa Bagelen, namun kondisi sosial ekonomi antar kedua wilayah tersebut relatif berbeda. Kabupaten Kebumen dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di lingkup Jawa Tengah, namun secara kuantitas memiliki tingkat partisipasi politik perempuan yang cukup tinggi baik secara regional maupun nasional.

Hal ini menjadi sebuah kajian menarik mengingat partisipasi politik perempuan yakni perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif secara global juga rendah, Indonesia 19,80 persen, Asean 18,20 persen, Asia 19,70 persen, dan dunia 23,60 persen. Secara kualitatif Kebumen juga pernah memiliki kepala daerah perempuan yang berhasil naik jenjang kariernya sampai ke level provinsi.

Adapun fokus penelitian yang dilakukan Soetji Lestari ialah untuk mengetahui partisipasi politik perempuan dalam masyarakat Jawa Bagelen studi mengenai potret capaian indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo diakhir program MDGs, sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan terfokus pada pengaruh keterlibatan wakil bupati perempuan dalam mewujudkan tata kelola anggaran berbasis gender studi kasus di Kabupaten Simeulue.

Penelitian kedua ditulis oleh Muh. Tri Purna P yang berjudul kebijakan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) dalam pengarusutamaan gender di Sulawesi Selatan, yaitu mengenai ketidakadilan gender atau diskriminasi gender terjadi akibat adanya perbedaan gender yang dikonstruksikan secara sosial, sehingga timbul perbedaan maupun pembatasan pada salah satu jenis kelamin. Adanya keyakinan dan membenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk pada kedua belah pihak menyebabkan pandangan yang mendiskreditkan salah satu kaum adalah kaum perempuan. Pentingnya aspek gender dalam pembangunan mendorong pemerintah untuk menyusun suatu strategi yang disebut dengan pengarusutamaan Gender.

Untuk itu pemerintah mengeluarkan instruksi presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender yang intinya “bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional, bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu mengeluarkan instruksi presiden. berbagai kebijakan nasional telah ditetapkan untuk memperkuat instruksi presiden tersebut antara lain. Peraturan menteri, nomor 67 tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.

Hasil penelitian dapat di simpulkan hasil berupa, pertama, kebijakan PUG di Provinsi Sulawesi Selatan sudah memadai meskipun pergub tentang pelaksanaan pergub PUG belum di undangkan. Pelaksanaan dari perda PUG belum dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan sehingga pelaksanaan PUG masih lambat di lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Adapun fokus penelitian yang dilakukan Muh Tri Purna P ialah untuk mengetahui kebijakan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) dalam pengarusutamaan gender di Sulawesi Selatan, sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan terfokus pada pengaruh keterlibatan wakil bupati perempuan dalam mewujudkan tata kelola anggaran berbasis gender studi kasus di Kabupaten Simeulue.

Penelitian ketiga ditulis oleh Eraisha Valensia yang berjudul “peran bupati dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM dalam perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG) pada APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2011-2013”. Dalam penelitian ini membahas tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah perencanaan dan penganggaran disusun dengan memperhatikan empat aspek: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang mana dilakukan secara adil antara perempuan dan laki-laki.¹³

Melalui Permendagri No. 67 tahun 2011, PPRG menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam mengimplementasikan gender strategi pengarusutamaan (PUG) di suatu daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Bupati Widya Kandi Susanti dalam merencanakan dan menganggarkan anggaran daerah yang responsif gender.

Ini juga menjelaskan berbagai permasalahan di lapangan seperti faktor pendukung dan penghuni baik dari dalam maupun dari di luar, sehingga pengaruh perempuan sebagai kepala daerah dalam perencanaan responsif gender dan anggaran untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender di Kabupaten Kendal dikenal.

¹³ Eraisha Valensia. 2013. *Peran Bupati dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM dalam perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG) pada APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2011-2013*. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. (<http://www.fisip.undip.ac.id/>).

Sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip dan sumber lain yang berkaitan dengan studi. Analisis menggunakan data kualitatif teknik analisis dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan komitmen Bupati Widya Kandi Susanti dalam mengurangi kesenjangan gender dituangkan dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Kendal dan siapa lebih banyak peran dalam pelaksanaan PPRG di Kabupaten Kendal adalah tim PUG. Hambatannya dalam pelaksanaan PPRG di Kabupaten Kendal adalah adanya rotasi dinas yang juga demikian cepat, belum adanya perda tentang pelaksanaan PPRG dan minimnya masyarakat pengetahuan resmi tentang penyebab gender PPRG belum diterapkan secara efektif di setiap SKPD, dan alokasi anggaran responsif gender dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kendal tahun 2011-2013 tetap netral.

Rekomendasi yang bisa diberikan adalah Pemerintah Kabupaten Kendal harus memberikan komitmen dan dukungan melalui peraturan daerah untuk menjamin implementasi gender anggaran responsif dalam kegiatan perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi. Publik pejabat juga perlu mendapatkan pelatihan anggaran responsif gender secara berkelanjutan dalam mengembangkan pemahaman yang tepat tentang anggaran responsif gender.

Adapun fokus penelitian yang dilakukan Eraisha Valensia ialah untuk mengetahui peran bupati dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM dalam perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG) pada APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2011-2013, sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan terfokus pada pengaruh keterlibatan wakil bupati perempuan dalam mewujudkan tata kelola anggaran berbasis gender studi kasus di Kabupaten Simeulue.

Penelitian keempat ditulis oleh Rinawati, dkk yang berjudul keterlibatan dalam pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan studi kasus di Bandung. Dalam penelitian ini membahas tentang pembangunan partisipatif adalah suatu pembangunan yang memungkinkan menumbuhkan kreatifitas dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan di suatu kawasan atau lingkungannya. Partisipasi masyarakat akan mengarahkan kepada tumbuhnya kemampuan-kemampuan masyarakat untuk mandiri. Partisipasi tidak hanya terbatas dalam pengertian “ikut serta” secara fisik, melainkan keterlibatan yang memungkinkan melaksanakan identifikasi masalah sendiri, mengorganisasikan masalah, mencari akar masalah dan menentukan perencanaan program pembangunan.¹⁴

¹⁴ Rinawati, dkk. 2007 *Keterlibatan dalam pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan studi kasus di Bandung*.P2U.

Perencanaan pembangunan partisipatif dipandang sebagai sebuah metodologi yang menghantarkan pelaku-pelakunya untuk dapat memahami masalah yang dihadapi, menganalisa akar-akar masalah tersebut, mendesain tindakan-tindakan terpilih dan memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. Dengan jumlah 6.1 juta perempuan mempunyai andil besar dalam setiap bidang kehidupan yang sama besarnya dengan laki-laki khususnya dalam perencanaan pembangunan partisipatif.

Kontribusi perempuan dalam proses pembangunan partisipatif berkategori tinggi, dimana kontribusi yang diberikan tidak hanya bersifat non materi dalam arti pikiran tenaga yang sudah dicurahkan untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif, namun juga perempuan memberikan partisipasi dalam wujud materi. Data penelitian yang menggambarkan bahwa ketika perempuan dihadapkan pada situasi memilih antara keluarga dan kegiatan lingkungannya, perempuan masih lebih mengutamakan keluarganya, maka keterlibatannya dalam pembangunan partisipatif merupakan pilihan alternatif setelah mengutamakan keluarga.

Adapun fokus penelitian yang dilakukan Rinawati, dkk ialah untuk mengetahui keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada perencanaan pembanguna studi kasus di Bandung, sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan terfokus pada pengaruh keterlibatan wakil bupati perempuan dalam mewujudkan tata kelola anggaran berbasis gender studi kasus di Kabupaten Simeulue.

Penelitian kelima ditulis oleh Frena Shinta Shitiawati yang berjudul analisis keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan gampong studi pada pemerintahan Gampong Beurawe Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini membahas tentang pemerintahan Gampong Beurawe adanya keterlibatan perempuan dalam Pemerintahan Gampong Beurawe, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di Pemerintahan Gampong Beurawe serta mengetahui hambatan perempuan dalam pengambilan keputusan di Pemerintahan Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.¹⁵

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode diskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori struktural fungsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam struktur pemerintahan Gampong Beurawe ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, perempuan diberi kesempatan yang sangat besar untuk mengurus administrasi Pemerintahan Gampong dan diberikan kewenangan penuh dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan.

¹⁵ Frena Shinta Shitiawati. 2015. *Analisis keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan gampong studi pada pemerintahan Gampong Beurawe Kota Banda Aceh*. ETD Unsyiah.

Hambatan perempuan dalam pengambilan keputusan karena isu perempuan yang belum diarusutamakan dalam pemerintahan gampong lebih kepada mengisi kuota 30%, efisiensi waktu rapat yang belum dikondisikan dengan ketersediaan waktu perempuan, lemahnya pemahaman dan minat perempuan dalam pengambilan kebijakan, serta ketokohan yang mengisi struktur Pemerintahan Gampong Jabatan yang telah diberikan kepada perempuan tidak hanya yang berhubungan dengan administrasi Pemerintahan Gampong, jabatan yang diberikan sudah pada tingkat penyusunan dan perumusan kebijakan, monitoring evaluasi, mengevaluasi hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan mengatur administrasi keuangan, APBG dan asset Gampong.

Adapun fokus penelitian yang dilakukan Frena Shinta shitiawati ialah untuk mengetahui analisis keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan gampong studi pada pemerintahan gampong beurawe kota banda aceh, sedangkan fokus penelitian yang peneliti lakukan terfokus pada pengaruh keterlibatan wakil bupati perempuan dalam mewujudkan tata kelola anggaran berbasis gender studi kasus di Kabupaten Simeulue.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Anggaran Responsif Gender

Anggaran adalah hasil negosiasi dari barter politik, bukan sekedar representasi nilai, untuk menerjemahkan tujuan politik menjadi sumber keuangan, dengan demikian perubahan pada struktur dan proses penganggaran melibatkan perubahan pada sistem politik dan distribusi pengaruh di antara para pemain politik lebih lanjut penganggaran berimplikasi pada konstruksi realitas sosial daripada menjadi cermin pasif dari realitas teknis.¹⁶

Tujuan utama anggaran adalah untuk menyatukan semua pengeluaran dan pendapatan publik dan untuk memberikan gambaran umum tentang keuangan publik dan dampaknya yang dimaksudkan pada ekonomi dan kesejahteraan manusia suatu negara. Anggaran responsif gender perlu memberikan gambaran umum tentang dampak anggaran secara keseluruhan terhadap tujuan kesetaraan gender, serta analisis dampak program demi program.

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

¹⁶ Rihab Khalifa. 2017. *Anggaran Responsif Gender: Alat untuk kesetaraan gender*. Departemen Akuntansi, Sekolah Tinggi Bisnis dan Ekonomi, Universitas Uni Emirat Arab.

Penerapan ARG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, tapi lebih kepada mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya, serta mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

- Prasyarat ARG

1. Kemauan Politik (terdapat dalam prioritas pemerintah: RPJMN, RKP, RENJA K/L);
2. Partisipasi/keterlibatan semua pihak;
3. Ketersediaan Data yang terpilah menurut jenis kelamin;
4. Sumberdaya manusia yang memadai (paham dengan konsep gender).

- Prinsip Dasar ARG

1. ARG bukan anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan
2. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan untuk setiap kegiatan;
3. Dengan menerapkan ARG bukan berarti ada penambahan dana yang dikhususkan untuk program ini;
4. Bukan berarti bahwa alokasi ARG berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan;

5. Tidak berlaku sebagai dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran;
6. Tidak semua program/kegiatan/output perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender, ada juga yang netral gender.

Menurut Budlender, Anggaran responsif gender berarti menentukan dampak dari kebijakan pendapatan dan belanja pemerintah pada perempuan dan laki-laki. Inisiatif ARG dapat terdiri dari komponen yang berbeda dan sangat bervariasi di setiap negara dan wilayah yang diberikan khusus sosial mereka, konteks politik, dan sifat dari lembaga pelaksana mereka.

Inisiatif-inisiatif ini, dipimpin baik oleh pemerintah atau kelompok masyarakat sipil, melibatkan pemeriksaan tentang bagaimana alokasi anggaran mempengaruhi peluang ekonomi dan sosial kaum perempuan dan laki-laki. Pelatihan ini tidak bertujuan untuk memisahkan anggaran untuk wanita maupun berargumen untuk meningkatkan program-program yang spesifik bagi perempuan.¹⁷

Inisiatif anggaran responsif gender tidak bertujuan untuk menghasilkan anggaran tersendiri untuk perempuan. Melainkan bertujuan untuk menganalisis segala bentuk pengeluaran publik, atau metode pengumpulan uang publik, dari perspektif gender, mengidentifikasi implikasi dan dampak bagi perempuan dan anak perempuan dibandingkan dengan laki-laki dan anak laki-laki.

¹⁷ Dwi Hastuti.2010.*Evaluasi Anggaran Responsif Gender Studi Alokasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2008-2010*. Universitas Sebelas Maret.

Inisiatif anggaran gender selalu melibatkan analisis gender dari beberapa dimensi pengumpulan dan penggunaan uang publik. Tetapi tidak ada satu pun cara untuk melakukan ini, dan sejumlah alat analisis dapat digunakan. Pelaksanaan prakarsa ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk, tergantung pada lokasi politiknya, prakarsa cakupan cakupannya, dan tahapan siklus anggaran di mana tersebut dijalankan.¹⁸

1. Lokasi Politik

- Di tingkat pemerintah nasional, regional atau lokal;
- Di dalam departemen pemerintah, diorganisir oleh pejabat dan menteri;
- Dalam majelis terpilih, diorganisir oleh perwakilan terpilih;
- Di luar pemerintah, diorganisir oleh peneliti dan organisasi masyarakat sipil.

Proses konsultatif yang interaktif yang melibatkan semua hal di atas terbukti sangat efektif. Penganggaran responsif gender perlu diorganisir dengan cara yang mendemokratisasi proses pembuatan dan pelaksanaan anggaran, kepentingan dan memberikan lebih banyak suara untuk perempuan.¹⁹

¹⁸ Budlender, Debbie dan Rhonda Sharp. 1998. *Bagaimana Melakukan Analisis Anggaran Peka Gender: Penelitian dan Praktik Kontemporer*. Sydney: Sekretariat Persemakmuran/Badan Pembangunan Internasional Australia.

(Review of Gender Responsive Budget Initiatives).

¹⁹ Budlender, Debbie. 2002. (Review of Gender Responsive Budget Initiatives).

2. Cakupan

- Seluruh anggaran (jarang dicoba, hingga saat ini);
- Pengeluaran departemen atau program yang dipilih;
- Pengeluaran untuk proyek baru;
- Bentuk pendapatan tertentu (pajak, biaya pengguna, dan lain-lain.);
- Perubahan dalam sistem perpajakan;
- Implementasi undang-undang baru.

Pengeluaran dan pendapatan yang akan ditanggung umumnya dipilih berdasarkan analisis pola ketidaksetaraan gender, prioritas perempuan dan pemerintah kebijakan tentang ketidaksetaraan gender di negara yang bersangkutan.

3. Klasifikasi Anggaran

- Item baris: pengeluaran dengan pembayaran (gaji, perjalanan, peralatan, bangunan, dan lain-lain.);
- Fungsional: pengeluaran untuk tujuan yang luas (polisi, pertahanan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain.);
- Ekonomi: operasi keuangan berdasarkan dampak ekonomi (modal dan saat ini pengeluaran dan pendapatan; subsidi; pembayaran transfer; pembayaran bunga; dan operasi pembiayaan;
- Administrasi: pengeluaran oleh lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola dana;

- Program: pengeluaran menurut program, dianggap sebagai sekumpulan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi tujuan yang sama;
- Teritorial: pendapatan dan pengeluaran menurut wilayah geografis yang terkena dampak.

4. Tahap Siklus

- Perencanaan untuk mengidentifikasi tujuan;
- Penilaian untuk mengidentifikasi alokasi keuangan untuk memenuhi tujuan;
- Mengaudit untuk mengidentifikasi penyalahgunaan uang;
- Evaluasi sejauh mana tujuan telah tercapai.

Perencanaan dan penilaian dibatasi oleh komitmen pada aktivitas yang ada, yang mungkin sulit diubah. Audit dan evaluasi harus memberikan umpan balik ke dalam perencanaan dan penilaian tetapi paling baik dilakukan dengan jeda karena anggaran tahun depan harus disiapkan sebelum anggaran tahun ini diaudit dan dievaluasi. Hubungan antar tahapan sering kali lemah. Anggaran dapat dikaitkan dengan rencana pengeluaran tahun jamak, yang dapat ditargetkan bersama dengan anggaran tahunan.

5. Penyajian Analisis

Hasil analisis gender atas pengeluaran dan pendapatan dapat disajikan dengan cara yang berbeda dan oleh pelaku yang berbeda:

- Pada sejumlah poin dalam anggaran utama dan / atau laporan evaluasi;
- Dalam lampiran khusus pada anggaran utama dan / atau laporan evaluasi;
- Dalam makalah pengarahannya untuk anggota parlemen;
- Dalam siaran pers;
- Dalam pengajuan ke gugus tugas pemerintah, kelompok perencanaan, pertanyaan, dan lain-lain;
- dalam publikasi penelitian;
- Dalam publikasi pendidikan populer.

Kerangka fungsional untuk mengaitkan anggaran dengan kesetaraan gender, ialah rincian penganggaran responsif gender perlu dirancang dengan cara khusus negara. Namun prinsip umumnya selalu menyatukan dua badan pengetahuan yang biasanya dipisahkan, yaitu pengetahuan tentang ketidaksetaraan gender dan pengetahuan tentang keuangan publik dan program sektor publik. Jika siklus anggaran diambil sebagai titik tolak, mungkin berguna untuk memikirkan kerangka kerja berikut, yang berfokus pada dampak kegiatan yang tercakup oleh anggaran dan dapat digunakan dalam perencanaan dan penilaian dan dalam audit dan fase evaluasi.

Untuk setiap kementerian atau program yang dipilih, lihat direncanakan dan direalisasikan *masukan, kegiatan, keluaran dan dampak*. Seringkali terdapat kesenjangan penting antara rencana, seperti yang disajikan dalam anggaran dan dokumen lain, dan realisasinya, seperti yang terungkap dalam audit dan evaluasi.²⁰

Input, terdiri dari uang yang dialokasikan dan dibelanjakan (sebagaimana disajikan dalam klasifikasi fungsional atau program);

Kegiatan, terdiri dari layanan yang direncanakan dan diberikan, seperti layanan kesehatan, layanan pendukung industri, transfer sosial, pengumpulan pajak. Ini mungkin tidak selalu ditentukan dengan baik dan mungkin tidak jelas berapa banyak uang yang seharusnya atau memang mencapai titik di mana kegiatan berinteraksi dengan publik. Salah satu tantangannya adalah memungkinkan publik untuk memantau disposisi pendanaan.

Output, terdiri dari pemanfaatan kegiatan yang direncanakan dan disampaikan seperti pasien yang dirawat, dukungan bisnis, pendapatan meningkat, pajak yang dikumpulkan. Keluaran dan indikator yang diinginkan mungkin tidak selalu ditentukan dengan baik, sehingga salah satu tantangannya adalah meningkatkan spesifikasi dan mengidentifikasi sumber statistik yang relevan.

²⁰ Elson, Diane. 1998. *Mengintegrasikan Isu Gender ke dalam Kebijakan dan Prosedur Anggaran Nasional: Beberapa Pilihan Kebijakan*, Journal of International Development 10. (Review of Gender Responsive Budget Initiatives).

Dampak, terdiri dari pencapaian yang direncanakan dan aktual terkait dengan tujuan yang lebih luas, seperti masyarakat yang sehat, bisnis yang kompetitif, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan pendapatan nasional yang berkelanjutan. Dampak dan indikator yang diinginkan juga mungkin tidak selalu ditentukan dengan baik sehingga tantangan lainnya adalah meningkatkan spesifikasi dan mengidentifikasi sumber statistik yang relevan. Selain itu, hubungan antara keluaran dan dampak mungkin tidak pasti dan kompleks.

Analisis anggaran gender dapat dilakukan, terlepas dari apakah kesetaraan gender telah secara eksplisit ditetapkan sebagai hasil dan dampak yang diinginkan dari kementerian atau program, dengan menanyakan apakah dampak yang direncanakan dan terealisasi mendorong kesetaraan gender serta tujuan lainnya;

1. Keluaran didistribusikan secara adil antara perempuan dan laki-laki dan memadai untuk mencapai kesetaraan gender serta tujuan lainnya;
2. Kegiatan dirancang agar sama-sama sesuai bagi perempuan dan laki-laki dan memadai untuk mencapai kesetaraan gender serta tujuan lainnya; dan
3. Masukan memadai untuk mencapai kesetaraan gender dan tujuan lainnya.

Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan data terpilah menurut jenis kelamin dan pemahaman tentang hubungan gender yang relevan. Berbagai alat dan pendekatan, termasuk pendekatan partisipatif, dapat digunakan untuk melakukan analisis ini. Dialog antara pejabat dan organisasi masyarakat sipil direkomendasikan.

Analisis ini dapat diterapkan pada pendapatan maupun pengeluaran, dengan memperlakukan biaya pengumpulan pendapatan sebagai input, proses pengumpulan sebagai aktivitas, pendapatan yang akan dinaikkan sebagai output dan dampak pajak, retribusi, dan lain-lain. pada pendapatan sebagai dampaknya.

Kemajuan dapat dicapai melalui spesifikasi dampak dan tujuan keluaran yang lebih baik, dengan mengubah prioritas yang menentukan kegiatan dan pendanaan. Kesenjangan gender sering kali melengkapi tujuan kebijakan lainnya. Tetapi jika trade-off ditemukan antara kesetaraan gender dan tujuan lain, ini harus dicatat dan cara untuk mengurangi trade-off harus diselidiki. Perhatian juga harus diberikan pada isu-isu gender yang lintas kementerian dan program. Misalnya, mengurangi ketimpangan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal pengeluaran publik untuk pendidikan mungkin memerlukan perubahan tidak hanya dalam program untuk sekolah dasar dan menengah di kementerian pendidikan tetapi juga dalam berbagai program dan kementerian lainnya.

Untuk membawa perubahan, hasil analisis harus secara efektif disampaikan kepada pembuat kebijakan dan publik melalui laporan, pertanyaan dan audiensi parlemen, dialog kebijakan, surat kabar, buku, materi pendidikan populer dan pertemuan publik. Diskusi yang terinformasi harus difasilitasi dan dicari cara untuk memungkinkan publik berpartisipasi dalam penetapan prioritas anggaran, memberikan perhatian khusus untuk memungkinkan perempuan merumuskan dan mengekspresikan gagasan mereka.

Tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan anggaran harus diperiksa, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Tanzania:

Lebih dari semua orang Tanzania adalah perempuan. Namun hanya sebagian kecil orang yang membuat keputusan penting tentang anggaran pemerintah adalah perempuan. Misalnya, hanya 3 dari 30 anggota Komite Keuangan dan Ekonomi Parlemen adalah perempuan dan hanya 45 dari 275 Anggota Parlemen adalah perempuan. Dengan sedikitnya perempuan yang membuat anggaran, tidak mengherankan jika anggaran tidak secara efektif memenuhi kebutuhan perempuan.²¹

Analisis gender dari anggaran secara keseluruhan, ialah gender sebagai masalah lintas sektor, salah satu tujuan penting adalah untuk mendapatkan pengakuan bahwa isu kesetaraan gender hadir dalam pekerjaan semua kementerian, dan dalam berbagai program, tidak hanya dalam program yang ditargetkan untuk meningkatkan posisi perempuan. Pengakuan gender sebagai isu lintas sektor dapat diterjemahkan ke dalam seperangkat indikator untuk memantau sensitivitas gender dari seluruh anggaran. Mengikuti klasifikasi fungsional dan program dari pengeluaran yang dianggarkan dan pengeluaran aktual, seseorang dapat menghitung indikator untuk pengeluaran yang direncanakan dan yang sebenarnya, seperti:

²¹ Perencanaan Nasional, Kementerian Keuangan dan Perencanaan, CENWOR. Pemerintah Tanzania. 2000. *Status Report on Integrating Gender into the National Budgetary Process in Tanzania*, makalah yang dipresentasikan pada Pertemuan Keenam Menteri Persemakmuran yang Bertanggung Jawab untuk Urusan Perempuan, New Delhi.

- Bagian dalam total pengeluaran pengeluaran yang secara eksplisit ditargetkan untuk mempromosikan kesetaraan gender;
- Bagian dalam total pengeluaran yang dialokasikan untuk layanan publik yang diprioritaskan oleh perempuan;
- Bagian dalam total pengeluaran pengeluaran yang ditujukan untuk transfer pendapatan yang diprioritaskan oleh perempuan.

Indikator tersebut akan menjadi versi yang lebih disempurnakan dari yang dipopulerkan dalam prakarsa UN 20/20, yang berupaya membuat pemerintah mengalokasikan 20 persen dari pengeluaran publik untuk layanan sosial dasar dan membantu donor untuk mengalokasikan 20 persen dari pendanaan mereka untuk layanan sosial dasar.

Salah satu keterbatasan indikator tersebut adalah bahwa indikator tersebut tidak menangkap berapa banyak pengeluaran yang sebenarnya diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi perempuan. Banyak manfaat yang dapat ditangkap oleh karyawan sektor publik yang beroperasi dengan beberapa kali pemindahan dari publik. Selain itu, indikator saham tidak memberi tahu kita apakah pengeluaran riil per kapita telah Naik atau turun.

Nilai dari inisiatif anggaran responsif gender adalah bahwa mereka memberikan cara praktis untuk membawa agenda pengarusutamaan gender ke dalam departemen pemerintah yang paling kuat. Mereka mempromosikan akses kelompok perempuan, perwakilan perempuan terpilih dan kementerian perempuan ke departemen keuangan. Mereka memungkinkan kami untuk *mengikuti uang* dari perspektif perempuan miskin dan mempromosikan penggunaan uang publik untuk mencapai keadilan gender.²²

Adapun alasan penulis menggunakan Anggaran Responsif Gender (ARG) daripada Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) karena melihat pelaksanaan ARG dari segi lokasi, cakupan, klasifikasi anggaran, tahap siklus dan penyajian analisis., dan untuk setiap kementerian atau program yang dipilih, lihat direncanakan dan direalisasikan *masukan kegiatan, keluaran dan dampak*. Sedangkan PPRG merupakan suatu proses yang perlu dilaksanakan oleh para perencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagai wujud adanya komitmen para pengambil keputusan, dengan harapan kegiatan yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sedangkan ARG adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumberdaya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

²² (Review of Gender Responsive Budget Initiatives).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karna itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai sehingga tepat pada sasaran.²³

Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berbicara langsung dan mengobservasi beberapa orang, dan melakukan interaksi selama beberapa bulan untuk mempelajari latar, kebiasaan, perilaku dan ciri-ciri fisik dan mental orang yang diteliti.²⁴

²³ Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm 11.

²⁴ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000), hlm 5.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini tentang “pengaruh keterlibatan wakil bupati perempuan dalam mewujudkan tata kelola anggaran berbasis gender”, karena peneliti ingin menyoroti ide penelitian ini secara detail sehingga mendapatkan jawaban sesuai fokus penelitian.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kabupaten Simeulue. Lokasi penelitian ini dipilih karena mempertimbangkan bahwa Kabupaten Simeulu menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki kepala daerah perempuan (wakil bupati) hasil pilkada 2017.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan secara langsung untuk memperbanyak hasil temuan yang tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang tetapi juga terhadap obyek alam lainnya, agar peneliti lebih mengenal situasi dan dapat mengumpulkan keterangan yang lebih banyak, maka metode ini dilakukan pada awal penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan pedoman, petunjuk dan arah dalam melakukan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut *Sugiyono*, ada tiga macam wawancara yakni wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semiterstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Wawancara dilakukan secara terbuka di mana para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud wawancara. Pada proses pengumpulan data, peneliti pada tahap awal mewawancarai narasumber sebagai komunikan, dan wawancara dilakukan sampai peneliti mendapat jawaban jelas dan mendetail mengenai fokus penelitian serta peneliti sudah tidak menemukan informasi baru lagi.²⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.²⁶

²⁵ Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2008), hlm 23.

²⁶ Johni Dimiyati. *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya*. (Jakarta: Kencana. 2013), hlm 100.

3.5 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan informan atau responden. Peneliti akan wawancara dengan informan untuk menggali informasi. Penelitian ini yang menjadi sumber data utama adalah pemerintah daerah, sumber data pendukung dalam penelitian ini adalah lembaga terkait di Kabupaten Simeulue.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau dihasilkan dari pihak lain namun dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder dalam penelitian ini juga didapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat menjadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, selain itu juga dari referensi buku, jurnal, ebook, artikel terkait penelitian dan laporan dari pihak instansi, LSM, partai politik dan media massa.

3.6 Informan Penelitian

NO	Informan	Jumlah
1	Wakil Bupati Kabupaten Simeulue	1
2	Sekretaris Dinas P3AKB	1
3	Kepala BPKD	1
4	Anggota DPRK Simeulue (Perempuan)	1
5	LSM (PKK Kab Simeulue)	1
6	Media Massa (Harian Rakyat Aceh)	1
7	Partai Politik (PBB)	1
Jumlah		7

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data kualitatif merupakan kajian yang menggunakan data-data teks, persepsi, dan bahan-bahan tertulis lain untuk mengetahui hal-hal yang tidak terukur dengan pasti. Dalam penelitian kualitatif, metode analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun diluar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan huberman sebagai berikut:²⁷

- a. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengaharapkan hal-hal penting, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.
- b. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keshuruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan unuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

²⁷ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (terj. Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 1992), hlm 19.

- c. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan tersebut hanya bersifat sementara dan umum.²⁸

3.8 Validasi data

Menurut *Moleong* untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data kualitatif yaitu :²⁹

a. Kredibilitas (*credibility*)

1. Memperpanjang masa observasi, yaitu keikutsertaan dalam proses penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan. Perpanjangan keikutsertaan menuntut waktu yang cukup lama untuk peneliti terjun kelokasi guna mendeteksi dan memperhitungkan penyimpangan yang dapat mengotori data. Dipihak lain untuk membangun kepercayaan subjek kepada peneliti dan kepercayaan terhadap isi peneliti sendiri.

²⁸ Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ...hlm 341.

²⁹ Lexy J. Moleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif* ,,, hlm 173.

2. Ketekunan pengamatan yang terus menerus. Pada kegiatan ini pengamatan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang sangat relevan dengan isu yang sedang dicari dan selanjutnya memusatkan diri pada masalah tersebut secara rinci. Oleh sebab itu berarti peneliti mengadakan pengamatan dilokasi dengan teliti dan rinci secara berkelanjutan terhadap faktor-faktor yang dominan. Kemudian menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pemeriksaan pada tahap awal terlihat salah satu atau semua faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.
3. Triangulasi (metode, sumber data, dan alat pengumpul data). Pemeriksaan data dengan perbandingan data dari sumber yang berbeda untuk mengantisipasi data yang hilang, dalam melakukan triangulasi data-data yang ditemukan dalam penelitian. Apakah seluruh data-data yang diperoleh saling mendukung.
4. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Hal ini dimaksudkan memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk memulai menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari dari pemikiran paneliti. Dalam diskusi ini juga bisa terungkap segi- segi lainnya yang justru membongkar atau membuka pemikiran peneliti. Sebaiknya teman diskusi memiliki pengalaman dalam bidang yang dipermasalahkan terutama isi dan metodologinya.

5. Analisis kasus negatif. Dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh-contoh dan kasus yang tidak sesuai tentang ide penelitian dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembandingan.
6. Kecukupan referensi. Referensi yang digunakan harus sesuai dengan sumber data. Pengecekan ulang terhadap sumber data yang dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan maupun studi dokumen.

b. Keteralihan (*transferability*)

Dengan melakukan uraian rinci dari data ketegori, dari kasus ke kasus lain sehingga setiap pembaca laporan penelitian ini mendapatkan gambaran yang jelas dan dapat menerapkannya pada konteks lain yang sejenis. Dalam hal ini peneliti harus menyajikan data penelitian dengan jelas dan 68 akurat. Sehingga akan memberi masukan bagi siapa saja yang membaca dan akan merasa tertarik untuk dapat diaplikasikannya pada tempat dan konteks yang lain.

c. Kebergantungan (*dependability*)

Yaitu mengusahakan agar proses penelitian tetap konsisten dengan meninjau ulang semua aktifitas penelitian terhadap data yang telah diperoleh dengan memperhatikan konsistensi dan realibilitas data. Jika dua atau beberapa kali pengulangan dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan realibilitasnya tercapai.

Peneliti dalam konteks ini dapat mengadakan beberapa kali wawancara dengan informan peneliti. Juga berulang mengadakan pengamatan untuk mencari tingkat reabilitas yang tinggi.

d. Kepastian (*confirmability*)

Yaitu mengusahakan agar data dapat dijamin keterpercayaannya sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dipertanggung jawabkan. Cara yang dilakukan dengan mengaudit semua data yang diperoleh untuk menentukan kepastian dan kualitas data yang diperoleh. Kepastian hasil peneliti dapat diakui oleh banyak orang secara objektif. Dalam hal ini peneliti guna menguji kevalidan data atau keabsahan data agar objektif kebenarannya sangat dibutuhkan beberapa orang nara sumber sebagai informan dalam penelitian.

Dengan cara teknik diatas diharapkan tingkat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian data dapat disajikan secara objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL

4.1 Profil Kabupaten Simeulue Dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue

4.1.1 Profil Kabupaten Simeulue

Kabupaten Simeulue merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang resmi dibentuk pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue. Sebelumnya secara administratif Kabupaten Simeulue adalah bagian dari wilayah Kabupaten Aceh Barat. Kota Sinabang merupakan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan dari Kabupaten Simeulue, Kabupaten Simeulue memiliki 138 desa dan terbagi menjadi 10 kecamatan yaitu: Simeulue Timur, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Simeulue Cut, Teupah Selatan, Teupah Barat, Teupah Tengah, Teluk Dalam, Salang, dan Alafan.³⁰

- *Ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah satu ukuran kinerja pembangunan daerah dalam meningkatkan perekonomiannya. Stabilitas perekonomian merupakan prasyarat dasar dalam tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Berikut pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simeulue mulai dari tahun 2012 sampai 2018:

³⁰ RPJMK Simeulue Tahun 2017 -2022 (Diakses Pada 14 Juli 2021).

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
1	2012	5,16%.
2	2013	4,69%
3	2014	4,33%
4	2015	4.47%
5	2016	4,53%
6	2017	4, 65%
7	2018	4,70%

Berdasarkan tabel diatas, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 4,70%, meningkat dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh sebesar 4,53%. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut masih lebih rendah dari pencapaian tahun 2012. Capaian tahun 2012 merupakan prestasi tertinggi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue selama kurang lebih 10 tahun terakhir.

- *Pendidikan*

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan. Kemajuan pendidikan di Kabupaten Simeulue terlihat dari beberapa indikator, salah satunya adalah angka partisipasi murni (APM). APM adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Capaian APM pada semua jenjang pendidikan selama lima tahun terakhir juga terlihat bervariasi.

Pada tahun 2014 APM sebesar 78,03%, tahun 2015 APM sebesar 82,17%, tahun 2016 APM sebesar 73,88%, tahun 2017 APM sebesar 77,55%, tahun 2018 APM sebesar 74,94%. Berdasarkan data tersebut, capaian APM Kabupaten Simeulue terus naik turun. Pada tahun 2015 APM Kabupaten Simeulue lumayan tinggi, terlihat jelas angka partisipasi murni pada setiap tingkat pendidikan dan pada tahun lainnya masih dibawah capaian tahun 2015 lalu.

- *Sosial Budaya*

Masyarakat Simeulue merupakan masyarakat yang heterogen dengan banyak suku dari berbagai daerah. Pulau ini memiliki macam-macam bahasa, yaitu bahasa Devayan, bahasa Leukon, dan bahasa Sigulai yang digunakan sebagian besar masyarakat.³¹

Akibat akulturasi budaya menyebabkan Simeulue memiliki beberapa kesenian yang diadopsi dari berbagai suku seperti Aceh, Nias, Batak dan Sulawesi (Bugis). Mayoritas penduduk Simeulue juga memeluk agama Islam. Pembangunan seni dan budaya yang bercorak (ciri khas) lokal Kabupaten Simeulue patut menjadi prioritas pembangunan selama enam tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Simeulue terus mendorong percepatan pembangunan seni dan budaya melalui kegiatan pagelaran seni dan budaya, penguatan organisasi budaya, dan pembinaan sanggar (*group*) kesenian.

³¹ Ibid

- *Indeks Demokrasi*

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Aceh dalam skala 0 sampai 100. Kinerja demokrasi Aceh masih berada pada kategori “sedang”. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60). Penurunan IDI dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh perubahan tiga aspek demokrasi yakni kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi yang turun.³²

Kabupaten Simeulue sendiri merupakan salah satu Kabupaten di Aceh yang secara umum indeks demokrasinya berdasarkan data yang ada diakumulasi dalam angka IDI Provinsi Aceh secara keseluruhan, bahwa indeks demokrasi Kabupaten Simeulue, Aceh berada di kategori “sedang”.

- *IPG (Indeks Pembangunan Gender)*

Berdasarkan visi misi dan program prioritas Kabupaten Simeulue terdapat dalam RPJMK Simeulue fokus pelayanan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan anak dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG). Berdasarkan data BPS, dilihat dari data IPG Kabupaten Simeulue pada tahun 2017 sebesar (76,72), tahun 2018 sebesar (77,52) dan tahun 2019 sebesar (77,92). Meskipun setiap tahunnya tidak mengalami penurunan tapi angka IPG Kabupaten simuelue masih sangat rendah.³³

³² Badan Pusat Statistik Aceh (DIakses Pada 15 Juli 2021).

³³ www.bps.go.id (diakses pada 20 Februari 2021).

- *IPM (Indeks Pembangunan Manusia)*

Pembangunan sumberdaya manusia merupakan suatu proses yang dibangun agar masyarakat mampu memiliki lebih banyak pilihan (pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik, dan sebagainya). Berdasarkan BPS, angka IPM Kabupaten Simeulue pada tahun 2017 sebesar (61,25) tahun 2018 sebesar (61,68) dan tahun 2019 sebesar (62,73). IPM Kabupaten Simeulue mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun tidak terlalu signifikan.

Peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Simeulue selama lima tahun terakhir tidak terlepas dari peningkatan komponen pembentuk IPM. Angka harapan hidup. Demikian juga dengan komponen pembentuk IPM lainnya, seperti rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang cenderung meningkat signifikan.

4.1.2 Profil Wakil Bupati Perempuan

- *Latar Belakang*

Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Priode 2017-2022 adalah ibu Hj Afridawati yang merupakan masyarakat asli Simeulue yang lahir pada tanggal 12 Maret 1960 tepatnya di kota Sinabang.³⁴

- *Keluarga*

Afridawati adalah seorang politisi perempuan yang sudah menikah dan memiliki 3 orang anak, suaminya bernama Drs. H Darmili yang merupakan mantan bupati Simeulue dua priode maju dari partai golongan karya sedangkan anak pertamanya pertama adalah dr. Inda Darmayanti seorang dokter spesialis di rumah sakit, anak keduanya Andi Millian seorang anggota DPRK Simeulue maju dari partai golongan karya dan anak ketiganya adalah kapten INF. Wahyu seorang KOPASUS di Jakarta. Seperti dalam pernyataan ibu wakil saat di wawancara sebagai berikut:

³⁴ Portal Resmi Kabupaten Simeulue (Diakses Pada 15 Juli 2021).

“Saya memiliki tiga orang anak. Anak pertama saya seorang dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit Simeulue, anak kedua saya anggota DPRK Simeulue, dan anak ketiga saya KOPASUS di Jakarta . Jadi kalau saya pikir dunia ini tidak habis-habisnya, kalau kita sudah sukses dan anak-anak kita sudah sukses kita harus pikir orang lain juga. Bagaimana orang juga sukses, maju, dan perempuan tidak dianggap lemah karena kita perempuan ini kuat dan pintar. Perempuan bisa lakukan yang laki-laki lakukan tapi laki-laki tidak bisa lakukan yang perempuan lakukan. Disitulah kelebihan perempuan dan itu juga kalau kita perempuan ini mau tapi ada juga orang yang tidak peduli.”³⁵

- *Pendidikan*

Pada tahun 1969 Ibu Afridawati pertama kali mengenyam pendidikan dasar di SD Negeri 1 Sinabang. Dilanjutkan tahun 1974 ke SMP Negeri 1 Sinabang dan tidak melanjutkan pendidikan SMA karena adanya kendala satu dan lain hal dan menyelesaikan pendidikan. Selanjutnya pada tahun 2005 di SMA Negeri 1 Paket C Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue.³⁶

³⁵ Wawancara (15 April 2021).

³⁶ Ibid, (Diakses Pada 15 Juli 2021).

Secara personal ibu Hj Afridawati selaku wakil bupati perempuan pertama yang diberi amanah oleh masyarakat Simeulue untuk menjadi kepala daerah di Kabupaten Simeulue. Meskipun latar belakang pendidikan beliau tidak setinggi aktor politik lainnya namun ibu Afridawati mampu bersaing dari kontestasi politik di pemilu tahun 2017 lalu.

Menurut data profil dari ibu Hj Afridawati, beliau lulusan sekolah menengah atas dengan salah satu pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan luar sekolah atau paket C. Berikut pernyataan dari ibu Afridawati sendiri:

“Mereka sudah punya ilmu sudah punya SDM dan beda tidak bisa disamakan dengan kami yang tamatan SMA ini. Pejabat ini memerintah jadi kita perintahkan mereka bekerja karena mereka sudah paham tinggal kita perintah mereka kerjakan saya tidak perlu pintar-pintar kali yang penting anak buah saya pintar apa yang disuruh mereka ngerti itu kalau prinsip saya, kita pun pandai tapi anak buah kita bodoh iya tidak jalan”.³⁷

³⁷ Wawancara (15 April 2021).

- *Karir*

Mempunyai karir yang bagus di tengah-tengah masyarakat adalah proses yang dilalui. Disaat perempuan bisa menjadi pemimpin yang belajar dari pengalamannya mulai sebagai Direktur CV. Damayanti yang bergerak di bidang properti dan penginapan, kemudian Komisaris PT. Padan Tadaro yang bergerak di bidang proyek pembangunan dan SPBU dan sekarang dipercaya sebagai Wakil Bupati Kabupaten Simeulue.³⁸

Berdasarkan pengalaman beliau dalam menjalankan usaha yang bergerak di lingkungan masyarakat, sehingga beliau bisa membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat dan dikenal oleh masyarakat. Seperti CV Damayanti yang mengelola properti seperti perumahan dan properti dari bahan jati berbau jadi seperti bangku, lemari, tempat tidur dan lainnya.

- *Organisasi*

Apapun yang kita kerjakan hari ini akan menjadi pengalaman di kemudian hari. Hal yang sama juga terjadi pada Ibu Hj Afridawati yang sebelum menjadi wakil bupati Simeulue beliau telah memiliki banyak pengalaman dalam menjalani sebuah organisasi baik itu organisasi perempuan maupun organisasi umum sejak tahun 2001 hingga sekarang beliau telah aktif dalam berbagai organisasi.

³⁸ Ibid, (Diakses Pada 15 Juli 2021).

Sejak tahun 2001 sampai 2012 ibu Afridawati telah menjadi Ketua PKK Kabupaten Simeulue, Ketua Dekranasda Simeulue, Pengurus Dharma Wanita Persatuan dan Ketua Wanita Karya Partai Golkar, Selanjutnya tahun 2014 sampai 2019 menjadi Anggota Ikatan Keluarga Dewan, Ketua DPD II Partai Golkar Sisa Priode.³⁹

Apabila kita lihat dari pengalaman-pengalaman beliau dalam berorganisasi selama kurang lebih 20 tahun belakangan ini membuktikan bahwa beliau mampu terlibat bahkan memimpin organisasi tersebut sehingga paham hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan secara tidak langsung melatih beliau menjadi seorang pemimpin yang memanfaatkan akses lebih dan lihai dalam upaya negosiasi dalam segala dalam hal.

Dampak dari pengalaman yang ditekuni selama ini menjadikan sosok ibu Afridawati perempuan yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat karena dengan pengalaman tersebut beliau bisa menjadi kepala daerah dipercayai dan dianggap mampu untuk memimpin daerah dengan sisi kepemimpinannya sebagai perempuan. Pada pernyataan berikut menunjukkan bahwa ibu Afridawati paham apa yang harus dilakukan untuk mengupayakan SDA dan SDM di Kabupaten Simeulue:

³⁹ Ibid.

“Mendatangkan ahli untuk mengajarkan cara pembuatannya itu pernah saya lakukan. Mendatangkan orang dari Yogyakarta karena kita di sini banyak batok kepala yang bisa dibuat jadi hiasan, piring dari batok kelapa. Kemudian tikar dari pandan dari rotan terus furniture ya kan kursi-kursi dari rotan, kayu dan pohon kelapa juga bisa. Cuma kita disini SDM nya kurang kita harus mendatangkan ahli dari luar untuk dilatih, tapi sekarang saya lihat sudah tidak ada lagi”.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara, beliau mengutarakan bahwa masyarakat sering mengunjungi kediamannya di Desa Amiria Bahagia. tepatnya di Losmen Padanta Daro. Masyarakat bersilahturahmi dengan ibu Afridawati untuk beberapa alasan seperti membutuhkan bantuan, menuntut janji, curahan hati dan lain sebagainya, berikut pernyataannya:

“Masyarakat banyak berharap sama saya, jadi mereka itu selalu curhat sama saya, saya kurang lebih dapat memberikan solusinya”.

Di Kabupaten Simeulue kegiatan seperti ini sangat sering terjadi, dimana masyarakat kota maupun luar kota akan bersilahturahmi kerumah orang nomor satu di daerah yaitu Bapak Bupati dan orang nomor dua di daerah yaitu Ibu Wakil Bupati. Dikarenakan masyarakat Simeulue merasa lebih nyaman menemui kedua orang tersebut di kediamannya masing-masing dan masyarakat Simeulue merasa apa yang menjadi maksud serta tujuan mereka akan direspon lebih cepat dan pulang dengan bahagia karena mendapat sesuatu umumnya berupa uang atau barang.

⁴⁰ Wawancara (15 April 2021).

Kurang lebih berikut bagan yang dapat menjelaskan profil dari Ibu

Wakil Bupati Kabupaten Simeulue:

PROFIL WAKIL BUPATI SIMEULUE

Hj. AFRIDAWATI



DATA DIRI

Nama	: Hj. Afridawati
Tempat/Tgl. Lahir	: Sinabang, 12 Maret 1960
Alamat	: Jln. T. Umar No. Desa Amiria Bahagia, Sinabang
Agama	: Islam
Suami	: H. Darmili
Anak	: 1. dr. Inda Damayanti 2. Andi Millian 3. Kapten INF. Wahyu Millian

PENDIDIKAN

1. 1969-1974 : SD Negeri 1 Sinabang
2. 1974-1977 : SMP Negeri 1 Sinabang
3. 2005 : SMA Negeri Paket C Dinas Pendidikan

KARIR

1. Sampai 2010 : Direktur CV. Damayanti
2. Sampai 2010 : Komisaris PT. Padan Tadaro
3. 2017-2021 : Wakil Bupati Simeulue

ORGANISASI

1. 2001-2012 : Ketua PKK. Kabupaten Simeulue
2. 2001-2012 : Ketua Dekranasda Simeulue
3. 2001-2012 : Pengurus Dharma Wanita Persatuan
4. Ketua Wanita Karya Partai Golkar
5. 2014-2019 : Anggota Ikatan Keluarga Dewan
6. 2014-2019 : Ketua DPD II Partai Golkar Sisa Priode

Melihat profil wakil bupati perempuan dalam hal ini Ibu Hj Afridawati, beliau adalah seorang politisi perempuan yang memiliki nama baik di tengah masyarakat dan beliau memiliki peran penting di Kabupaten Simeulue. Tidak heran apabila beliau diajak untuk naik memimpin daerah Simeulue karena pengalaman, karir serta pengaruh yang dimilikinya cukup besar untuk dapat mensejahterakan Simeulue tercinta ini.

4.2 Wakil Bupati Perempuan Dan Anggaran Berbasis Gender Di Kabupaten Simeulue

- *Regulasi Berspektif Gender Di Kabupaten Simeulue*

Kabupaten Simeulue memiliki beberapa regulasi yang dijadikan sebagai landasan jalannya program-program berspektif gender sebagai berikut.⁴¹

1. UU No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan keluarga;
2. UU No. 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan;
3. UU No. 23 tahun 2002 tentang anak;
4. Peraturan Menteri PP No. 5 tahun 2014 tentang SIGA;
5. Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan; gender dalam pembangunan nasional;
6. UU No. 17 tahun 2007 tentang pembangunan nasional.

⁴¹ Dinas P3AKB Kabupaten Simeulue.

7. Qanun Aceh No. 6 tahun 2009 tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Berdasarkan regulasi diatas bahwa secara regulasi dilevel Kabupaten Simeulue tidak ada regulasi baru. Sejauh ini regulasi yang digunakan merujuk kepada regulasi nasional dan qanun Aceh tidak ada regulasi Kabupaten Simeulue yang spesifik gender.

- *Komposisi Penganggaran Di Kabupaten Simeulue*

Berdasarkan anggaran yang responsif terhadap kepentingan perempuan di Kabupaten Simeulue diketahui ada anggaran APBK dan implementasi APBK tahun 2017/2021, berikut penempatan penganggaran di Kabupaten Simeulue sebagai berikut:

- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB)

Tugas dan kewenangan dinas P3AKB adalah melakukan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persentase dana untuk tahun 2021 ini lebih kurang ada 27% dari alokasi anggaran pada P3AKB sebanyak Rp. 8.478.414.964.⁴² Kemudian hal tersebut juga ibu Afridawati menyampaikan bahwa ada APBK yang responsif terhadap perempuan salah satunya beliau menyebutkan dinas P3AKB, berikut pernyataannya:

⁴² Wawancara (24 April 2021).

“Dinas P3AKB itu mereka ada dana juga untuk meningkatkan persentasi terhadap kepentingan perempuan.”⁴³

Kemudian ada beberapa program yang dijalankan dinas P3AKB adalah:⁴⁴

1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

Mendorong pemahaman nilai-nilai kesetaraan gender bagi kaum laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan dan pemerintahan daerah. Mengurangi ketidakpahaman terhadap pemaknaan gender dan meningkatkan kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar.

2. Program perlindungan perempuan

Mendorong terwujudnya kebijakan perlindungan perempuan seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN TPPPO), penghapusan kekerasan seksual, meningkatkan hak perempuan di publik dan dipekerjaan.

3. Program peningkatan kualitas keluarga

Memberikan pendampingan keluarga melalui penyediaan layanan konseling/konsultasi di pusat pembelajaran keluarga sehingga setiap daerah menjamin kualitas tiap-tiap keluarga.

⁴³ Wawancara (15 April 2021).

⁴⁴ <https://www.kemenpppa.go.id/> (Diakses Pada 23 Juli 2021).

4. Program pengelolaan SIGA (sistem informasi keluarga)

Memutakhirkan data keluarga dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi, dan mendata keluarga baru yang ada maupun belum ada dalam Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI). Hal ini dilakukan petugas melalui kunjungan rumah dengan cara mewawancarai dan atau observasi keluarga.

5. Program perlindungan khusus anak

Mengembangkan konsep Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), mempercepat, pembentukan KLA, mempercepat proses pemenuhan hak anak.

6. Program pembinaan KB (keluarga berencana)

Program KB berorientasi pada kesehatan reproduksi, layanan yang berkeadilan, nondiskriminatif, sukarela, bermutu, juga dengan pilihan kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan, transparan, akuntabel serta kemitraan.

7. Pemberdayaan KS (keluarga sejahtera).

Melaksanakan, mengendalikan, serta evaluasi kegiatan operasional keluarga sejahtera.

Apabila berbicara tentang program yang dijalankan maka akan dipertanyakan apakah sudah terealisasi dengan baik atau hanya sekedar program saja tanpa diimplementasikan, namun sekretaris dinas P3AKB mengatakan bahwa setiap program kerja yang diusulkan dan disetujui 80% selama ini telah direalisasikan, berikut pernyataannya:⁴⁵

“Untuk implementasinya Alhamdulillah terlaksana dengan baik karena ada kegiatan-kegiatan yang belum kita laksanakan ke kecamatan, dikarenakan pandemi covid-19.”

Oleh karena itu, dinas P3AKB merupakan salah satu dinas yang mempunyai peran besar untuk meningkatkan IPG di Kabupaten Simeulue melalui pelaksanaan regulasi dan program kerjanya.

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)

Tugasnya dan kewenangannya dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

⁴⁵ Ibid.

DPMD bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat desa sehingga organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Simeulue dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Simeulue dibawah tanggung jawab DPMD mulai dari tempat, administrasi, dana program dan lainnya. Besaran anggaran dinas BPMD sekitar 2 Miliyar dan 400 untuk PKK dan Dekranasda.

Seperti pernyataan ibu Afridawati bupati sebagai berikut:

“Untuk kepentingan perempuan itu seperti PKK, DEKRANASDA, dan Majelistaklim itukan kepentingan perempuan.”

Berikut program-program yang dijalankan oleh PKK melalui beberapa kelompok kerja sebagai berikut:⁴⁶

1. Kelompok kerja tentang pendidikan anak remaja

Program yang mengupayakan pendidikan bagi anak remaja di masa di mana anak mengalami peralihan usia. Di usia penuh tantangan agar remaja daerah tidak salah langkah.

2. Kelompok kerja tentang kerajinan-kerajinan

Program yang mengembangkan keterampilan SDM sebagai bekal untuk berkarya serta menumbuhkembangkan cita rasa keindahan dan kemampuan menghargai seni rupa dan penerapannya.

⁴⁶ Wawancara (22 Mei 2021).

3. Kelompok kerja tentang tanam-tanaman hati nya PKK

Program pemberdayaan masyarakat melalui hati nya PKK dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan menghasilkan pangan yang berkualitas.

4. Kelompok kerja tentang kesehatan

Program peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan, peningkatan mutu sumber daya manusia, lingkungan yang saling mendukung serta peningkatan hubungan kerjasama dan koordinasi antara daerah berjalan dengan baik.

Selanjutnya program-program yang dijalankan oleh DEKRANASDA Kabupaten Simeulue sebagai berikut:⁴⁷

1. Peningkatan kemampuan SDM/perajin yang berdaya saing
2. Regenerasi SDM/perajin dalam upaya melestarikan produk kerajinan berbasis lokal sebagai warisan budaya bangsa, membina dan mengembangkan produk kerajinan yang berkualitas sebagai ciri khas.
3. Pengembangan inovasi dan kreatifitas produk kerajinan berbasis warisan tradisi dan budaya bangsa;
4. Menumbuhkan wirausaha baru;
5. Fasilitasi kepada perajin dalam rangka akses pembiayaan;
6. Promosi dan publikasi DEKRANASDA.

⁴⁷ <http://www.simeuluekab.go.id/> (Diakses Pada 23 Juli 2021).

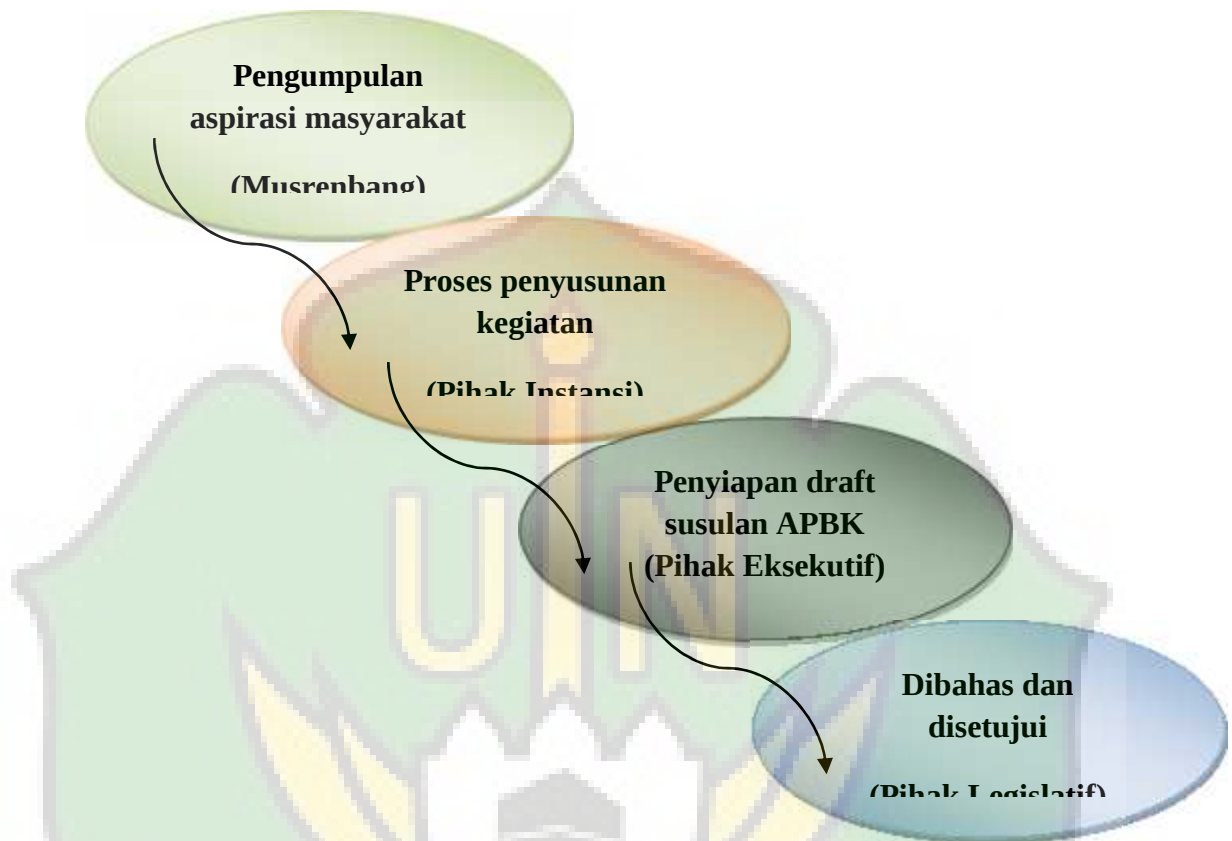
Apabila berbicara tentang program yang dijalankan maka akan dipertanyakan apakah sudah terealisasi dengan baik atau hanya sekedar program saja tanpa diimplementasikan, berikut pertanyaannya:

“Implementasinya jalan dan tetap dilakukan dan terimplementasikan juga pada sasaran yang dituju dan sesuai perencanaan.”

Berikutnya majelistaklim yang merupakan sebuah sebutan untuk lembaga pendidikan nonformal islam yang memiliki kurikulum sendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur dan diikuti oleh jamaah yang relatif banyak. Berdasarkan data yang diketahui lembaga ini kurang lebih aktif oleh anggota PKK dan DEKRANAS dan setingkat SKPD daerah yang menjadi jamaah majelistaklim.

Dari hasil diatas, dapat terlihat instansi-instansi yang diketahui sebagai sasaran penempatan penganggaran berbasis gender atau instansi yang memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan program-program terhadap kepentingan perempuan di Kabupaten Simeulue yaitu dinas P3AKB, BPMD (PKK, DEKRANAS dan Majelistaklim).

- *Siklus Penganggaran Di Kabupaten Simeulue*



Dalam proses penyusunan anggaran yang memerlukan waktu beberapa bulan, tim anggaran eksekutif yang beranggotakan unsur-unsur dari Sekretariat Daerah, BAPPEDA dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting. Walaupun masyarakat dilibatkan dan diminta pendapatnya dalam proses penentuan prioritas program namun pada akhirnya proses penyusunan program dilakukan secara tertutup di masing-masing satuan kerja (SKPD).⁴⁸

⁴⁸ Informan Tambahan (Ajudan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue).

Dengan ketidakterlibatan ibu Afridawati dalam proses perumusan anggaran daerah, beliau tidak mengetahui tupoksi-tupoksi setiap SKPD sehingga sulit mengetahui pengaruh beliau dalam mewujudkan anggaran yang berbasis gender di Kabupaten Simeulue. Seperti dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Saya cuma jadi rakitnya setelah sampai tujuan dibuangnya. Begilah kira-kira saya saat ini, itu semua dia yang atur dia semua yang pegang, orang-orangnya semua. Seperti kontrak pegawai negeri itu cuma saya sedikit yang banyaknya dia yang pegang. Makanya masyarakat mengeluh sama saya pak erli jadi bupati semua keluarga dan orang-orangnya yang ada di dinas ni semua.”

Tahapan Pelaksanaan proses penyusunan anggaran ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak eksekutif melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah, makanya sangat mengganjal apabila ibu Afridawati tidak terlibat sehingga beliau tidak paham mengenai segala sesuatu di pemerintahan baik anggaran dan lain sebagainya.

Tahapan ini mencakup antara penyiapan laporan semester pertama dan laporan tahunan termasuk penelaahan atas pelaksanaan anggaran untuk waktu satu tahun anggaran yang bersangkutan. Tahapan pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan internal yang dilakukan oleh BAWASDA dan BPKP (untuk pembelanjaan yang menggunakan APBN), serta pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kabupaten Simuelue melakukan proses penganggaran di setiap instansi di daerah melalui tahapan-tahapan yang sama. Pada umumnya sudah menjadi siklus rutin Kabupaten dalam penganggaran setiap perumusan anggaran di daerah. Kemudian dijalankan oleh setiap instansi sebagaimana tugas dan wewenangnya.

Dalam proses konsultasi perumusan anggaran APBK dan implementasi APBK Kabupaten Simeulue Tahun 2017/2021, ibu Afridawati menekankan bahwa beliau tidak dilibatkan dalam perumusan APBK Simuelue dan yang terlibat hanya bupati dan kepala-kepala dinas terkait karena hampir seluruh kepala dinas di Kabupaten Simeulue adalah orang-orang dari bapak bupati sehingga ibu Afridawati tidak dilibatkan dalam perumusan anggaran akhirnya tidak paham pembagian tugas pada setiap dinas di Kabupaten Simuelue dan tidak mengetahui detail siklus anggaran di Kabupaten Simeulue.

- *Komposisi Pelibatan Dalam Penganggaran Di Kabupaten Simeulue*

Ibu Hj. Afridawati selaku Wakil Bupati Kabupaten Simeulue, mengatakan bagaimana proses konsultasi yang dilakukan ketika perumusan anggaran APBK dan implementasi APBK sejak tahun 2017 sampai 2021, berikut pernyataannya:⁴⁹

“Untuk prosesnya kan kita setiap triwulan, APBK ini kan kita gunakan dan bagikan kepada masing-masing kepala dinas menyiapkan program-program apa untuk dijalankan, seperti Dinas Pekerjaan Umum untuk membuat jalan, membangun bangunan dan lain sebagainya itukan membutuhkan dana dan itu diadakan diperubahan dan disampaikan ke DPR.”

Mengenai keseluruhan anggaran APBK, ibu Afridawati berpendapat bahwa beliau tidak mengetahui apa-apa, dan berikut pernyataannya:

“Bagaimana saya tahu, bagaimana saya menyetujui apa yang diperbuat apa saja, apa yang dianggarkan untuk apa-apa saja.”

Dalam perumusan APBK Simeulue itu ada tim khusus anggaran pemerintah daerah yang mana biasa orang-orang yang terlibat selain kepala daerah itu seperti Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, Bappeda dan lainnya yang disebut Tim TAPK, berikut pernyataannya anggota DPRK Simeulue ibu Rita Diana Ber'eh:⁵⁰

⁴⁹ Wawancara (15 April 2021).

⁵⁰ Wawancara (21 Mei 2021).

“Saya dilibatkan, mewakili tim banggar (bagian anggaran) DPRK bersama tim TAPK pemerintah Kabupaten Simeulue.”⁵¹

Mengenai keseluruhan anggaran APBK, ibu Rita Diana berpendapat seperti pada umumnya apabila sesuatu yang telah dirumuskan berarti telah sesuai dengan yang hasil tahapan-tahapan dan berikut pernyataannya:

“Menurut pendapat saya kalau memang sesuai dengan hasil tahapan musrembang awal dari kecamatan sampai kabupaten sampai ditetapkannya sebuah perumusan. karena yang punya anggaran, visi misi, dan program itu adalah pemerintah, kami di DPR hanya sebagai wakil rakyat yang melakukan pembahasan dan penetapan terhadap perumusan yang telah diusulkan atau dirumuskan oleh pemerintah melalui tim TAPK.”

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala BPKD yaitu Bapak Marlian S.Ip, bahwa dalam perumusan APBK Simeulue itu ada tim khusus anggaran pemerintah daerah, yang mana tidak mengatakan secara langsung keterlibatan aktif atau pasifnya wakil bupati dalam setiap perumusan anggaran, berikut pernyataan:⁵²

“Kalau terlibat dalam perumusan ABPK Kabupaten itu terlibat sebagai tim anggaran pemerintah Kabupaten Simeulue. Sebenarnya TAPK terlibat di tahun 2020 dan tahun 2021 ini, kalau dari 2017 memang saya sudah pernah di sini sebagai sekretaris yang kosong hanya tahun 2018 dan 2019.”⁵³

⁵¹ Wawancara (20 Mei 2021).

⁵² Wawancara (14 April 2021).

⁵³ Wawancara (14 April 2021).

Kemudian dari pihak media massa bapak Ahmadi seorang wartawan Harian Rakyat Aceh di Kabupaten Simeulue, beliau mengatakan bahwa media massa tidak dilibatkan karena adanya media hanya sekedar publikasi semata, berikut pernyataannya:

“Kalau untuk anggaran enggak namanya itu juga antara media dan pemerintah itu tidak bisa dilibatkan karena sifatnya media. Apabila untuk bagian publikasinya itu kita menemukan data, kita pertanyakan apakah ini sudah sesuai atau tidak baru nanti ada hasilnya. Namun dari hasil berita itu akan mempengaruhi kebijakan.”⁵⁴

Berdasarkan siklus penanggaran di Kabupaten Simeulue dapat mengetahui proses lahirnya anggaran, mulai dari perumusan APBK dan lainnya terlihat bahwa ada yang menganjal dengan ketidakterlibatannya wakil bupati dalam setiap rapat perumusan anggaran.

Wakil bupati perempuan Kabupaten Simeulue tidak berdampak terhadap proporsi penganggaran berbasis gender karena dipengaruhi beberapa faktor pertama secara regulasi di level Kabupaten Simeulue tidak ada regulasi baru. Sejauh ini regulasi yang digunakan merujuk kepada regulasi nasional dan qanun Aceh tidak ada regulasi Kabupaten Simeulue yang spesifik gender. Kedua komposisi atau penempatan penganggaran di Kabupaten Simeulue berbasis gender yaitu dinas P3AKB, BPMD (PKK, DEKRANAS dan Majelistaklim). Ketiga proporsi SKPD tidak ada sama sekali orang-orang dari ibu Afridawati yang secara keseluruhan adalah orang-orang dari bapak bupati.

⁵⁴ Wawancara (20 Mei 2021).

4.3 Tantangan Wakil Bupati Perempuan Dalam Mendorong Kebijakan Anggaran Responsif Gender

4.3.1 Internal

- *Keluarga*

Tantangan secara internal dalam keluarga pasti ada saja yang memengaruhi kepemimpinan dari ibu Hj Afridawati seperti kita ketahui suami ibu wakil adalah mantan bupati Simeulue dua periode yang terbukti bersalah melakukan korupsi dana Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) sejak tahun 2002-2012 sebanyak Rp. 595.000.000.00 yang sekarang berada dalam tahanan selama 4,6 tahun kedepan. Berbagai isu-isu suami dan anak-anaknya tentu sangat berefek bagi ibu wakil sendiri dan menjadi tantangan tersendiri untuk menyakinkan publik khususnya masyarakat Simeulue kalau dia baik-baik saja dan yang terjadi pada suami tidak ada sangkut pautnya dengan ibu wakil yang merupakan istri sah dari bapak Darmili dan ibu kandung anak-anak nya.⁵⁵

Latar belakang masalah yang dialami oleh bapak bupati sebelumnya yang notabene adalah suami dari ibu Afridawati yang menyebabkan awal mula ketidakharmonisan hubungan antara bapak Bupati dan ibu Wakil Bupati di karenakan pada saat Bapak Darmili tertangkap oleh pihak berwenang karena tindak pidana korupsi dana Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dan Bapak Darmili ikut menyebut nama-nama yang terlibat dalam tindakan korupsi yang dilakukannya.

⁵⁵ Berita Media Massa (diakses Pada 14Juli 2021).

Salah satunya adalah bapak Bupati sekarang yaitu Erli Hasim sehingga dipanggil dan diperiksa dan ternyata tidak bersalah, mulai sejak saat masalah internal keluarganya tersebut hubungan ibu wakil bupati dan bupati merenggang tidak harmonis sampai sekarang. Hal tersebut sangat mempengaruhi perannya sebagai wakil bupati dan tidak dilibatkan pada setiap kegiatan pemerintah daerah salah satunya ketidakterlibatannya pada panganggaran di daerah sehingga tidak dapat mendorong kebijakan anggaran berbasis gender di Kabupaten Simeulue

- *Kapasitas*

Secara kapasitas ibu Afridawati tidak terlibat dalam proses perumusan anggaran daerah. Tidak adanya orang-orang beliau di SKPD juga mempengaruhi dan menyulitkan beliau untuk upaya negosiasi di pemerintahan. Terlebih beliau tidak mengetahui tupoksi-tupoksi setiap SKPD di Kabupaten Simeulue seperti PKK dan DEKRANASDA yang berada di Instansi BPMD.

Sulit mengetahui pengaruh beliau dalam mewujudkan anggaran yang berbasis gender di Kabupaten Simeulue apabila tidak memiliki jaringan di pemerintahan. Ibu Afridawati boleh berhasil melakukan negosiasi dengan masyarakat tapi belum mampu melakukan negosiasi dengan aktor di pemerintahan daerah tepatnya di Kabupaten Simeulue.

4.3.2 Eksternal

- *Pasangan (Bupati)*

Terpilih bersama untuk memimpin daerah yaitu bupati dan wakil bupati tentu tidak selamanya sepaham atau sejalan, tentu ada masalah baik internal maupun eksternal, seperti miss komunikasi sehingga terjadi kesalahpahaman antara keduanya sehingga masyarakat Simeulue meresahkan hubungan keduanya yang tidak harmonis tentu akan berefek bagi pemerintahan di Kabupaten Simeulue.

Ketidakterlibatan wakil bupati dalam penganggaran di Kabupaten Simeulue juga karena adanya tantangan eksternal dari Bupati karena keduanya memilih bekerja sendiri-sendiri dan selaku bupati Simeulue tentu memiliki akses lebih dari pada wakil bupati sehingga sedikitnya gerak untuk wakil bupati karena semua ditangani oleh bupati sendiri.

- *Partai Pengusung (PBB)*

Adanya hubungan yang tidak selaras antara ibu HJ Afridawati dan partai yang mengusungnya menjadi wakil bupati Simeulue. Hal ini juga di ketahui oleh masyarakat Simeulue bahwa partai yang mengusung ibu Afridawati pada tahun 2017 adalah Partai Bulan Bintang (PBB). Sedangkan masyarakat juga tahu bahwa beliau adalah Ketua DPD II Partai Golkar Sisa Priode. Berikut keterangan bapak Adi Shaleh, S.Sos.I.,MA selaku Sekretaris Partai Bulan Bintang beliau mengatakan bahwa partai tidak dilibatkan dalam perumusan APBD Simeulue karena partai hanya mengusung pasangan calon saja, berikut pernyataannya:

“Kalau partai enggak, kita tidak diikuti karena kita kan memang bukan bagian dari pemerintah maksudnya inikan partai politik kalau masalah anggaran itu di keuangan bukan dipartai politik. Sebagai partai yang mengusung bapak bupati dan ibu wakil bupati iya kita hanya mengusung maksudnya pasangan calon iya kalau sudah jadi itu sudah persoalan pemerintah daerah kan dalam hal ini keuangan.”⁵⁶

Setelah partai pengusung secara terang-terangan mengatakan hanya mengusung dan tidak mau ikut campur dalam urusan internal masing-masing kader dan tidak mau tahu permasalahan yang terjadi sehingga kedepan ibu wakil akan naik dengan partai yang berbeda dan partai yang mengusungnya harus selaras.

Ketidakterlibatan ibu wakil bupati dalam penganggaran di Kabupaten Simeulue juga karena adanya tantangan eksternal dari partai pengusung yang hanya menjadi kendaraan politik wakil bupati dan apabila sudah terpilih dilepas dan tidak diberi hak layaknya sebagai politisi yang naik dari partai politik. Bahkan wakil bupati sekarang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan partai selain untuk naik menjadi kepala daerah ditahun 2017 lalu dan hanya Bupati Simeulue yang masih menjadi bersama partai PBB saat ini.

⁵⁶ Wawancara (22 April 2021).

- *PKK Kabupaten Simeulue*

Ibu Afridawati pernah menjadi ketua PKK Kabupaten Simeulue kurang lebih 10 tahun, namun saat ini hubungan ibu wakil dengan PKK Kabupaten Simeulue memiliki jarak yang masalahnya tidak dapat dipastikan. Sesuai pernyataan salah satu anggota Pokja di Tim Penggerak PKK yaitu ibu Daliati sebagai berikut:

“Iya PKK dilibatkan dalam proses perumusan anggaran APBK Kabupaten Simeulue. PKK sekarang tidak sejalan dengan ibu wakil bupati karena ada lain dan satu hal”.⁵⁷

Ketidakterlibatan ibu wakil bupati dalam penganggaran di Kabupaten Simeulue juga karena adanya tantangan eksternal dari organisasi perempuan dalam hal ini PKK Kabupaten Simeulue yang sekarang ketuanya adalah istri bapak bupati Simeulue. Seperti halnya kita tahu hubungan bupati dan wakil bupati sedang tidak harmonis hal tersebut pun merambah hubungan ibu wakil bupati dengan PKK Kabupaten Simeulue.

Melihat tantangan wakil bupati perempuan dalam mendorong kebijakan anggaran responsif gender tadi dikarekakan, pertama tantangan internal keluarga ibu wakil bupati mengenai masalah korupsi yang menimpa suami beliau dan merupakan mantan bupati Simeulue sebelumnya. Kedua minimnya kapasitas diri dalam melakukan negosiasi pada aktor pemerintahan di Kabupaten Simeulue.

⁵⁷ Wawancara (22 Mei 2021).

Ketiga tantangan eksternal dari Bupati karena keduanya memilih bekerja sendiri-sendiri dan selaku bupati Simeulue tentu memiliki akses lebih dari pada wakil bupati sehingga sedikitnya gerak untuk wakil bupati karena semua ditangani oleh bupati sendiri. Keempat dari partai pengusung yang hanya menjadi kendaraan politik wakil bupati dan apabila sudah terpilih dilepas dan tidak diberi hak layaknya sebagai politisi yang naik dari partai politik. Kelima dari organisasi perempuan dalam hal ini PKK Kabupaten Simeulue yang masalahnya tidak diketahui tapi hubungan ibu Afridawati dan PKK ada jarak, dan sekarang ketuanya adalah istri bapak bupati Simeulue. Seperti halnya kita tahu hubungan bupati dan wakil bupati sedang tidak harmonis hal tersebut pun merambah hubungan ibu wakil bupati dengan PKK Kabupaten Simeulue.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa data dalam penelitian ini tentang pengaruh keterlibatan wakil bupati perempuan dalam mewujudkan tata kelola anggaran berbasis gender di Kabupaten Simeulue.

Maka pengaruh wakil bupati perempuan dalam mewujudkan anggaran berbasis gender di Kabupaten Simeulue tidak berdampak terhadap proporsi penganggaran berbasis gender karena dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut:

1. Secara regulasi di level Kabupaten Simeulue tidak ada regulasi baru. Sejauh ini regulasi yang digunakan merujuk kepada regulasi nasional dan qanun Aceh tidak ada regulasi Kabupaten Simeulue yang spesifik gender.
2. Komposisi atau penempatan penganggaran di Kabupaten Simeulue berbasis gender yaitu dinas P3AKB, BPMD (PKK, DEKRANAS dan Majelistaklim).
3. Proporsi SKPD tidak ada sama sekali orang-orang dari Ibu Afridawati yang secara keseluruhan adalah orang-orang dari bapak bupati.

Kemudian tantangan wakil bupati perempuan dalam mendorong kebijakan anggaran responsif gender disebabkan karena beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

1. Tantangan internal keluarga ibu wakil bupati mengenai masalah korupsi yang menimpa suami beliau dan merupakan mantan bupati Simeulue sebelumnya.
2. Minimnya kapasitas diri dalam melakukan negosiasi pada aktor pemerintahan di Kabupaten Simeulue.
3. Tantangan eksternal dari pasangan terpilih (bupati) karena keduanya memilih bekerja sendiri-sendiri dan selaku bupati Simeulue tentu memiliki akses lebih dari pada wakil bupati sehingga sedikitnya gerak untuk wakil bupati karena semua ditangani oleh bupati sendiri.
4. Tantangan dari partai pengusung yang hanya menjadi kendaraan politik wakil bupati dan apabila sudah terpilih dilepas dan tidak diberi hak layaknya sebagai politisi yang naik dari partai politik.
5. Tantangan dari organisasi perempuan dalam hal ini PKK Kabupaten Simeulue yang masalahnya tidak diketahui tapi hubungan ibu Afridawati dan PKK berjarak, dan sekarang ketuanya adalah istri bapak bupati Simeulue.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di kemukakan, maka peneliti dapat merumuskan saran sebagai berikut:

1. Kepada ibu Afridawati (Wakil Bupati Simeulue), dimohon kedepannya dapat menguatkan kapasitas diri dan memaksimalkan SDM yang dimiliki, sehingga dapat memahami tupoksi dalam memimpin, harmonis dengan pasangan (bupati), dan harus membangun negosiasi dengan partai pengusung.
2. Kepada patner (Bupati Simeulue), dimohon kedepannya menjaga komitmen dengan pasangan (wakil bupati) untuk bekerja sama di pemerintahan sesuai kontrak politik sebelum terpilih.
3. Kepada partai politik pengusung (PBB), dimohon kedepannya konsisten terhadap pasangan calon yang diusung, untuk tidak menjadi kendaraan politik aktor saja tapi mampu terlibat dalam menyelesaikan masalah internal pasangan yang diusung.
4. Kepada PKK Kabupaten Simeulue, dimohon kedepannya menjaga hubungan baik dengan siapapun, pentingnya komunikasi dengan aktor politik di daerah sehingga dapat mengoptimalkan upaya kesetaraan gender di Kabupaten Simeulue.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Widyani Soetjipto. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Arkaniyati. 2012. *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Usaha tani Bawang Merah Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah*.
- Budlender, Debbie dan Rhonda Sharp. 1998. *Bagaimana Melakukan Analisis Anggaran Peka Gender: Penelitian dan Praktik Kontemporer*. Sydney: Sekretariat
- Persemakmuran / Badan Pembangunan Internasional Australia. (Review of Gender Responsive Budget Initiatives).
- Budlender, Debbie. 2002. (Review of Gender Responsive Budget Initiatives).
- Dwi Hastuti. 2010. *Evaluasi Anggaran Responsif Gender Studi Alokasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2008-2010*. Universitas Sebelas Maret.
- Elson, Diane. 1998. *Mengintegrasikan Isu Gender ke dalam Kebijakan dan Prosedur Anggaran Nasional: Beberapa Pilihan Kebijakan*, Journal of International Development 10. (Review of Gender Responsive Budget Initiatives).
- Eraisha Valensia. 2013. *Peran Bupati dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM dalam perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG) pada APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2011-2013*. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
- F. A. S. Ani Purwanti, Lita Tyesta A.L.W. 2016. *Peran anggota DPRD dalam pembentukan kebijakan di dewan perwakilan rakyat daerah provinsi jawa tengah berbasis demokrasi deliberative*. Universitas Diponegoro.
- Frena Shinta Shitiawati. 2015. *Analisis keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan gampong studi pada pemerintahan Gampong Beurawe Kota Banda Aceh*. ETD Unsyiah.

- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Gaung Persada.
- Johani Dimiyati. 2013. *Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana.
- Lexy J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press.
- Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender . 2010. *Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender*. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Perdagangan.
- Pemerintah Tanzania. 2000. *Status Report on Integrating Gender into the National Budgetary Process in Tanzania*, makalah yang dipresentasikan pada Pertemuan Keenam Menteri Persemakmuran yang Bertanggung Jawab untuk Urusan Perempuan, New Delhi.
- (Review of Gender Responsive Budget Initiatives).
- Rinawati, dkk. 2007 *Keterlibatan dalam pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan studi kasus di Bandung*.P2U.
- Rihab Khalifa. 2017. *Anggaran Responsif Gender: Alat untuk kesetaraan gender*. Departemen Akuntansi, Sekolah Tinggi Bisnis dan Ekonomi, Universitas Uni Emirat Arab.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soetji Lestari. 2018. *Partisipasi politik perempuan dalam masyarakat Jawa bagelen studi mengenai potret capaian indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo diakhir program MDGs*.Universitas Jendral Sudirman Purwokerto. LPPM.

RPJMK Simeulue Tahun 2017-2022 (di Akses pada 21 Januari 2021).

www.bps.go.id (diakses pada 20 Februari 2021).

www.kpu.go.id (di akses pada 20 Februari 2021).

www.simeuluekb.go.id (diakses pada 21 januari 2021).

<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/55371> (diakses pada 21 Januari 2021).

<https://dinaspppa.acehprov.go.id/> (diakses pada 23 Januari 2021).



Lampiran: Dokumentasi Penelitian



Wawancara Dengan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Simeulue



Wawancara Dengan Sekretaris Dinas P3AKB Kabupaten Simeulue



Wawancara Dengan Kepala BPKD Kabupaten Simeulue



Wawancara Dengan Sekretaris Partai Bulan Bintang Kabupaten Simeulue



Wawancara Dengan Wartawan Harian Rakyat Aceh Kabupaten Simeulue



Wawancara Dengan Anggota DPRK Simeulue



Wawancara Dengan Pokja I PKK Kabupaten Simeulue